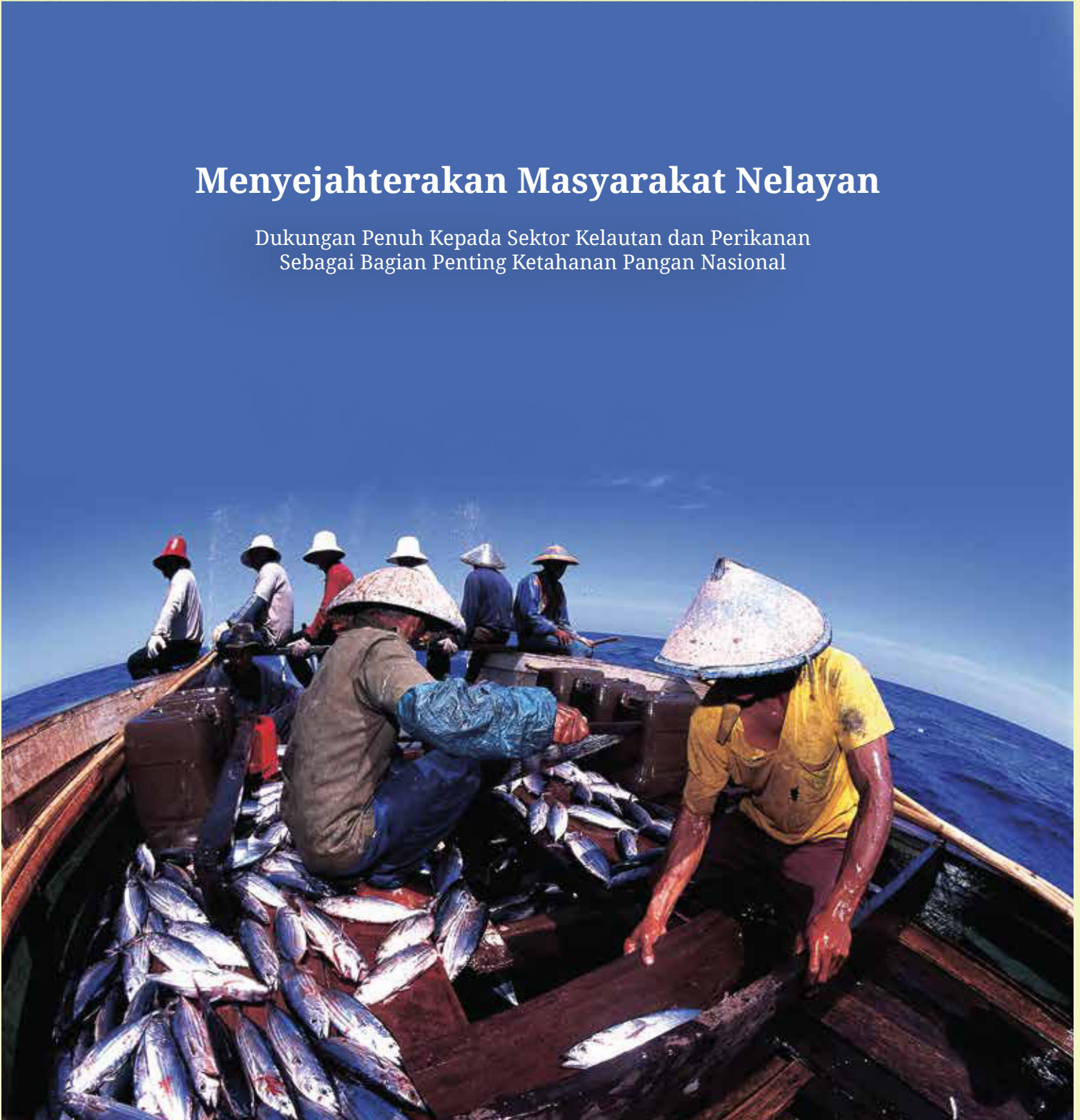


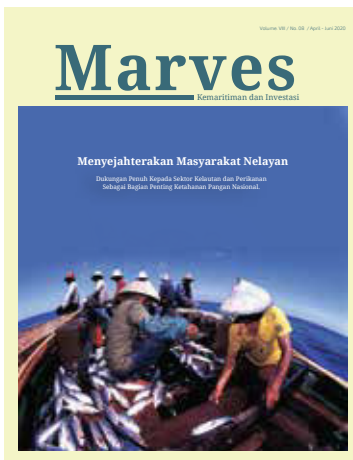
Marves

Kemaritiman dan Investasi

Menyejahterakan Masyarakat Nelayan

Dukungan Penuh Kepada Sektor Kelautan dan Perikanan
Sebagai Bagian Penting Ketahanan Pangan Nasional





Majalah Marves
Volume VIII
April - Juni 2020

Diterbitkan oleh: Sekretariat Kemenko Marves. **Penanggung Jawab:** Agung Kuswandono Sekretaris Kemenko Marves. **Pemimpin Redaksi:** Andreas Dipi Patria Plt. Kepala Biro Komunikasi. **Redaktur Majalah:** Khairul Hidayati Kepala Bagian Humas, Yanelis Prasenja Kasubbag POP. **Jurnalis:** Fahdiansyah Kasmiri, Wa Ode Sukma Sari, Meidika Sri Wardiana, Sri Wida Purbowasi. **Desain/Layout:** Dinta Audi Rahmalia, Bella Rahmah Herlita. **Fotografer:** Vebianto Faladi, Muchlisa Choiriah, Ilma Nurweli, Grace Natasya.

Sumber Foto Cover: Kompas

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.

Daftar Isi



Salam Marves

- 04** | Semangat Baru Di Era Tatanan Baru

Liputan Utama

- 06** | Dukungan Pemerintah Untuk Masyarakat Nelayan, Menko Luhut : Agar Segera Disalurkan dan Jangan Ada Gangguan

Kilas Balik

- 09** | Kompilasi Giat Kemenko Marves Periode Bulan April-Juni Tahun 2020
- 11** | Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Berbagai Regulasi Pemerintah Era *New Normal*
- 14** | Era Tatanan Kehidupan Baru, Pemerintah Terus Fokus Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi Covid-19
- 18** | Dunia Internasional Mengakui Indonesia Agresif Tangani Masalah Sampah

Liputan

- 22** | Gerak Cepat Kemenko Marves Tanggapi Keluhan Masyarakat Perihal Tagihan Listrik PLN
- 25** | Insentif Bagi Masyarakat Secepatnya Disalurkan dan Tepat Sasaran
- 27** | Pemerintah Terus Lanjutkan Proyek Infrastruktur Prioritas Untuk Rakyat
- 31** | Amanat Gaungkan Kembali Gerakan Indonesia Bersih Saat Pandemi
- 35** | Pemerintah Kembangkan Pariwisata *In City* dan Terapkan Protokol Kesehatan
- 38** | Optimisme Sektor Investasi Masa Pandemi

Kolom

- 39** | Kemenko Marves Adakan Rapid Test Covid-19 Memasuki Era *New Normal*
- 41** | Kemenko Marves Gandeng Kemenparekraf Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 43** | Kelola Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Kearifan Lokal
- 45** | Kemenko Marves Terus Mempercepat Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Feature

- 47** | Resensi Film Extraction Antara Anak Tentara dan Anak Bandar Narkoba
- 48** | Cerita Pendek Kamar Kesakitan Karya Joko Rehutomo
- 51** | Tahukah Kamu? Lambang RAPATI TNI dan Laut Natuna Utara



Podcast Media Kemenko Marves



Media kementerian dengan berbagai macam informasi update bersama narasumber pilihan **Kemenko Marves.**

Semangat Baru Di Era Tatanan Baru

Pandemi global covid-19 sampai dengan saat ini, belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir, setidaknya hingga vaksin wabah itu bisa ditemukan. Dengan fakta tersebut, bukan berarti membuat kita pesimis dan lantas menyerah, menghindar bukanlah sebuah opsi, mengaku kalah? jelas kita semua juga tidak akan sudi, tetapi yang pasti kita bisa menyiasatinya dan hidup berdampingan dengan aman, sehat, sekaligus tetap produktif.

Era tatanan kehidupan baru, sejatinya pula membawa semangat baru. Sesuai arahan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, semua pihak, utamanya setiap pemangku kebijakan, mutlak bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas. Menko Luhut berulang kali menegaskan agar semua pihak harus proaktif, dan mengerjakan segala sesuatunya secara holistik guna membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Majalah Marves edisi kali ini mengangkat Liputan Utama, yaitu, dukungan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya dalam hal ini masyarakat nelayan, dan arahan Menko Luhut, agar segera

disalurkan tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak manapun. Sedangkan, dalam kolom Kilas Balik, Majalah Marves akan mengulas berbagai dinamika dan progress yang terjadi seputar Kemaritiman dan Investasi, periode April-Juli 2020, antara lain penerapan regulasi pemerintah di era tatanan baru dan sosialisasinya. Kemudian, strategi pemulihan ekonomi/penanganan dampak pandemi, seperti insentif pemerintah terfokus di bidang kesehatan, perlindungan sosial/jaring pengaman sosial, insentif usaha sektor parekrif, UMKM/Gernas BBI, dukungan dana bagi korporasi dan membangun kemandirian nasional sektor kesehatan untuk percepatan produksi vaksin, *kit diagnostic* dan APD lokal. Dan juga, *update* penanganan sampah dan *marine debris*.

Para Deputi di bawah komando Menko Luhut pun unjuk gigi dan tak mau ketinggalan untuk terus bergerak, antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sigap menangani keluhan masyarakat terkait tagihan listrik PLN. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang terus mendorong dan mengawal dukungan atau insentif bagi sektor perikanan dan kelautan. Dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, yang terus fokus untuk progress

infrastruktur dan regulasi sektor transportasi. Kemudian, ada dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang terus berkomitmen untuk menggaungkan kembali Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan penuntasan revitalisasi DAS Citarum. Selanjutnya, datang dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tampil untuk mengkoordinasi kementerian/lembaga terkait dalam hal reaktivasi sektor pariwisata untuk pemulihan perekonomian dan terakhir dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan perihal optimisme sektor investasi dan pertambangan di masa pandemi.

Akhir kata, saya mewakili seluruh Tim Majalah Marves yang telah bekerja keras untuk penerbitan Majalah Marves edisi ke-VIII ini, menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan yang tentunya tidak kami sengaja. Segala kritik dan sumbang saran dari seluruh Tim Marves sangat kami nantikan, dan kami pun membuka diri untuk menerima berbagai tulisan dan artikel yang tentunya sesuai dengan Majalah Marves.

Andreas Dipi Patria
Plt. Kepala Biro Komunikasi
Kemenko Marves



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi
@kemenkomarves

Mimin penasaran nih, kegiatan apa aja sih yang #TimMarves kerjain selama #diRumahAja? Udah mulai bete? atau malah muncul keahlian baru selama di rumah?

@mz.iyann

Buat vlog min, Membuat cerita menggunakan peraga boneka

@berliaanaa

Belajar Masak Juga

@achuetinenakamyu

Jatah shopping/jalan-jalan ditiadakan diganti dengan kurir depan rumah teriak "PAKET!!"

@rasyidbottom

Makan, tidur, bangun, makan, tidur lagi.



Dukungan Pemerintah Untuk Masyarakat Nelayan

Ini Saya garis bawahi, untuk penyaluran bantuan itu jangan sampai ada gangguan. Masalah ini super penting apalagi di saat kondisi seperti ini. Dan juga untuk pengiriman bantuan, terutama yang sudah berjalan periksa lagi keamanannya, dicek lagi seluruhnya terutama kebersihannya. Saya minta kepada jajaran, baik di pemerintahan pusat dan daerah, supaya jangan sampai ada aturan yang justru mempersulit penyaluran atau pengiriman logistik untuk masyarakat.

Luhut B. Padjaitan
Menko Marves

Majalah Marves-Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang para menteri dan ketua lembaga terkait untuk membahas penyiapan kebijakan guna mendukung sektor kelautan dan perikanan tetap kuat menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

“Koordinasi ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, utamanya membantu sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional, apalagi dalam kondisi tidak biasa saat ini” ujar Menko Luhut saat melaksanakan *video conference* Rakor mengenai kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19, di Jakarta pada Jum’at (17-04-2020).

Menteri KKP, Edhy Prabowo menyampaikan meskipun dalam situasi yang tidak mudah ini, sektor kelautan dan perikanan tetap bisa menjaga produktivitasnya berkat upaya antisipasi yang telah dilaksanakan sesuai arahan Presiden RI melalui Kemenko Marves. Lebih lanjut disampaikan bahwa estimasi produksi perikanan tangkap dan budidaya Indonesia tetap dalam kondisi yang baik, dimana pada April-Juni 2020 dapat mencapai 1,8 juta ton dan 109,7 ribu ton.

Upaya antisipisasi memang sangat diperlukan untuk mencegah kerugian para pelaku usaha yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli dalam masa Covid-19 ini, yang mengakibatkan penumpukan stok ikan dan turunnya harga, ditambahkan juga adanya pengurangan permintaan dari negara pengimpor.

Luhut B. Pandjaitan
Menko Marves

Menko Luhut langsung menanggapi bahwa situasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, namun kita tetap harus optimis dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dan harap tetap dapat bertahan menjaga suplai produk perikanan untuk mendukung kebutuhan domestik dan juga ekspor. Beliau lalu menambahkan bahwa untuk mendukung penjualan produk ikan nasional, akan dibuka kargo pesawat ke China, Jepang dan Korea Selatan untuk mendorong ekspor produk perikanan kita ke luar dan menjaga ekonomi nasional tetap baik, dan juga untuk mendukung impor barang-barang keperluan masyarakat dalam kondisi wabah ini.

“Kegiatan perikanan dapat tetap dijalankan untuk mendukung suplai pangan dan mendukung ekonomi bangsa, dengan syarat harus sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk kebaikan kita semua” kata Menko Luhut.

“Beberapa langkah pengaturan pengangkutan benih, pakan, dan produk perikanan di beberapa daerah yang menerapkan PSBB, dukungan kelancaran ekspor perikanan, pengelolaan *cold storage*, perizinan kapal penangkap ikan dan relaksasi bagi ABK melaut telah dilakukan dengan upaya maksimal melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait” ujar Menteri KP. Menteri Edhy juga menambahkan bahwa komunikasi intensif juga terus dilakukan antara KKP dan Kemenko Marves melalui Dirjen-Dirjen KKP dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Menteri KP telah menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Menko Marves untuk meningkatkan produksi udang nasional melalui perluasan wilayah tambak, dan telah disiapkan 5 lokasi baru yang berpotensi dapat menyediakan 1 juta lapangan kerja dengan penghasilan mencapai 10 juta per KK per bulan dengan sistem intensif, dan ini sudah diuji di lapangan.

“Ini belum lagi kita bicara mengenai potensi lobster Indonesia yang memiliki kelimpahan luar biasa, yang pengelolaannya diharapkan dapat membantu perekonomian nelayan dan pembudidaya lobster, tentunya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah” imbuhnya.

“Dengan semua kondisi tersebut, didukung oleh arahan Menko dan bantuan dari Menteri dan Ketua Lembaga lain, kami yakin bahwa sektor perikanan akan menjadi pemenang dalam masa pandemi covid-19, dan bahkan saat situasi ini kami tetap melakukan penangkapan kapal ilegal yang masuk perairan Indonesia” tegas Menteri Edhy. Hal tersebut diamini dan didukung kuat oleh Menteri PUPR, Kapolri, Menteri Perdagangan, dan Gubernur BI, bahwa semua upaya tersebut harus dilakukan dengan bersatu padu.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin menyampaikan usulan rekomendasi kebijakan yang perlu segera diambil langkah untuk membantu pelaku usaha perikanan Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 ini, di antaranya: pembelian produk perikanan oleh BUMN dan Pemda untuk mengurangi penumpukan stok ikan, bantuan sosial untuk keluarga nelayan dan pembudidaya, relaksasi hutang bagi pelaku usaha perikanan skala kecil, penempatan *cold storage* sesuai ketersediaan stok ikan, penerapan Sistem Resi Gudang, dan tidak lupa beliau menambahkan untuk perluasan cakupan Permenkeu No.23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan tersebut langsung direspon dan mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, bahkan tidak lupa Menko Luhut menegaskan bahwa untuk bantuan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya harus di awasi agar dapat diterima secara baik, tepat sasaran dan bermanfaat. “Semua kegiatan yang dilakukan untuk membantu industri

EKSPOR PERIKANAN INDONESIA

NAIK 10,96%
JANUARI - MARET 2020
295,13 TON

NAIK 29,84%*
APRIL 2020
119,65 TON

*dibandingkan dengan April 2019

kelautan dan perikanan Indonesia tetap berjalan lancar di masa pandemi Covid-19 ini harus dilaksanakan dengan koordinasi baik dengan Pemda, dan tetap harus sesuai protokol kesehatan” kata Menko Luhut.

Video conference Rakor Mengenai Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 ini turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Kapolri Idham Azis, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Bakamla Aan Kurnia, Kepala BNPB Doni Monardo, dan perwakilan K/L lainnya.

BLT Untuk Nelayan

Pemerintah kemudian menyiapkan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk 1 juta nelayan yang terdampak Covid-19. Sinkronisasi data nelayan terdampak pandemi tengah disebut pemerintah agar insentif segera bisa disalurkan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marves), Safri Burhanuddin mengatakan, pemberian BLT kepada nelayan merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. “Kemarin dalam sidang kabinet terbatas, Presiden mengarahkan agar segera dilihat kembali datanya. Jangan sampai ada nelayan yang tidak masuk daftar penerima bantuan langsung,” kata Deputi Safri dalam Dialog Indonesia Bicara bertema Produksi Perikanan Nasional di Tengah Pandemi, Rabu 3 Juni 2020 malam.

Deputi Safri mengakui, data saat ini 70% nelayan miskin belum masuk ke dalam daftar penerima BLT. Ia memastikan Kemko Marves beserta kementerian terkait tengah mempercepat proses pendataan. “Sesuai arahan Presiden segera disatukan datanya. Jadi isu utama saat ini memang masalah data. Sekarang kita semua sedang sinkronisasi datanya. Satu juta nelayan itu harus masuk ke dalam sistem yang akan diberikan bantuan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial, Juliari Batubara segera mendatangi kantor Menko Bidang Kemaritiman dan

Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Prinsipnya, beliau (Luhut) menyerahkan keputusan kepada Kementerian Sosial,” kata Menteri Juliari di Kantor Kemko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020).

Pada kesempatan itu, Mensos Juliari mengatakan, bahwa sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Sebab hal ini terkait dengan skema yang telah berjalan di Kementerian Sosial. Sementara, pendataan terkait nelayan yang akan menerima bantuan dari pemerintah berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. “*Cleansing* datanya yang kami terima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Mensos Juliari.

Dia menambahkan, mungkin nanti akan ada perbaikan data, baik itu penghapusan data atau yang lainnya. Dari ini, nanti bisa dialihkan untuk nelayan atau yang lainnya. Nantinya, BLT khusus nelayan berjumlah Rp 600 ribu per bulan, tidak semua nelayan bakal mendapatkan BLT. Ada beberapa syarat, salah satunya penerima harus masuk kategori miskin.

Perihal BLT kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi, memang mendapat perhatian sangat besar dari Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, dalam banyak kesempatan, Menko Luhut kerap menyerukan agar semua pihak tanpa terkecuali membantu kelancaran penyaluran bantuan, apalagi pada situasi seperti sekarang ini.

“Ini saya garis bawahi, untuk penyaluran bantuan itu jangan sampai ada gangguan. Masalah ini super penting apalagi di saat kondisi seperti ini, dan juga untuk pengiriman bantuan, terutama yang sudah berjalan periksa lagi keamanannya, dicek lagi seluruhnya terutama kebersihannya. Pengangkutan truk logistik di jalan raya ataupun kargo di pelabuhan jangan sampai ada gangguan. Saya minta kepada jajaran, baik di pemerintahan pusat dan daerah, supaya jangan sampai ada aturan yang justru mempersulit penyaluran atau pengiriman logistik untuk masyarakat,” tegas Menko Luhut, dalam sebuah Rakor *Virtual* bersama seluruh Kementerian Koordinator beberapa waktu lalu.

Kilas Balik



24 April 2020
**Menko Luhut
Inspeksi di Tol
Jakarta - Cikampek**



24 April 2020
**Menko Luhut
Inspeksi Stasiun
Senen Terkait
Pembatalan Tiket**



30 April 2020
**Menko Luhut
Wawancara
Bersama RRI**



14 Mei 2020
**Penyerahan Bantuan
Fasilitas Kesehatan
Covid-19 dari
Bank DBS**



15 Mei 2020
**Deputi Ridwan
Menerima Bantuan
APD dari China**



18 Mei 2020
**Sesmenko Agung
Memberikan
Bantuan Kepada
Pegawai**



29 Mei 2020
**Deputi Safri
Wawancara
Bersama TVRI**



5 Juni 2020
**Deputi Odo
Wawancara
Bersama TVRI**



6 Juni 2020
**Deputi Seto
Wawancara
Bersama TVRI**



9 Juni 2020
**Kemenko Marves
Adakan
Rapid Test**



5 Juni 2020
**Menko Luhut
Video Conference
CEO US-Asean**



8 Juni 2020
**Menko Luhut
Melantik
Eselon 1**



30 April 2020
**Menko Luhut
Menghadiri Vidcon
Belt and Road
2020**



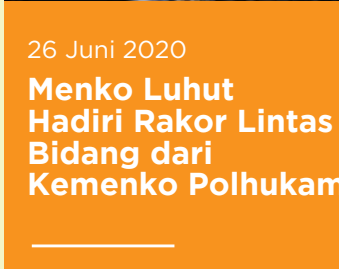
15 Juni 2020
**Menko Luhut
Memberikan Kuliah
Pada Lembaga
Pendidikan dan
Pelatihan Sekolah
Polri**



19 Juni 2020
**Menko Luhut
Pimpin Rapim
Terkait Pending
Issue Tiap
Kedeputan**



22 Juni 2020
**Menko Luhut
Mengikuti Raker
DPR RI Tentang
RAPBN 2021**



26 Juni 2020
**Menko Luhut
Hadiri Rakor Lintas
Bidang dari
Kemenko Polhukam**



23 Juni 2020
**Menko Luhut
Wawancara
Bersama RRI**



30 Juni 2020
**Menko Luhut
Membuka
Penyerahan
Bantuan dari Nestle**



29 Juni 2020
**Menko Luhut
Hadiri Rapat
Lanjutan Lintas
Bidang Kemenko
Polhukam**

Protokol Kesehatan Demi Keselamatan Bersama

Menko Luhut : Masyarakat Harus Paham dan Wajib Mematuhi

Majalah Marves-Jakarta, Hampir seluruh negara di dunia yang terkena dampak pandemi covid-19, termasuk juga Indonesia, telah menerbitkan berbagai kebijakan baru, terutama kebijakan yang terkait dengan protokol kesehatan. Isi dari kebijakan atau protokol kesehatan itu kurang lebih sama, yaitu mengubah cara pandang masyarakat, agar menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih waspada dan pintar meniyasati pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yakni hidup berdampingan, tetap produktif dan aman, serta yang lebih penting lagi tetap sehat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, belum lama ini atau tepatnya pada Rabu 20 Mei 2020, menyatakan bahwa, setiap kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah, dalam hal penanganan dan pengendalian pandemi covid-19, adalah semata-mata demi keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, dan menurutnya, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.

Yang perlu diwaspadai, lanjut Menko Luhut, walaupun grafik penyebaran covid-19 sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun terdapat beberapa titik baru yang bermunculan dan riset juga menunjukkan adanya gelombang kedua.

“Berdamai bukan pula kembali menjalani kehidupan normal seolah tak ada pandemi. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu waspada dengan gelombang kedua dan masyarakat tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan yang ada, kita wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini penting sekali, apalagi saat ini grafiknya cukup mengkhawatirkan, ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Tidak tinggal diam, Menko Luhut lantas mendorong penyusunan protokol usaha dalam menghadapi *new normal* atau era normal baru. Dia meminta penyusunan protokol usaha dipelopori Kementerian Kesehatan. Hal itu disampaikan Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Protokol Pelaksanaan Usaha di Era Kenormalan Baru bersama sejumlah Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta, Rabu 03 Juni 2020.

Ditekankan oleh Menko Luhut, agar penyusunan protokol industri tetap mengacu pada standar penanggulangan covid-19, seperti menerapkan jaga jarak (*physical distancing*), penggunaan masker, dan cuci tangan. Lingkungan kerja dilengkapi alat-alat pembersih seperti cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), sabun dan tempat cuci tangan yang layak, masker, cairan disinfektan, alat pengukur suhu tubuh, sarung tangan, serta obat-obatan untuk memperkuat sistem imun tubuh. “Yang penting yang tiga. Jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan. Itu soal kecil, tapi kalau kita lakukan dampaknya besar karena menyangkut kepada protokol kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, instansi/perusahaan juga harus melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 terhadap para pekerja atau buruh. Salah satunya dengan memberikan instruksi tegas sesuai protokol pencegahan virus seperti menjaga kesehatan tubuh, melarang adanya interaksi atau pertemuan dengan jumlah massa yang banyak, dan juga pemberlakuan WFH (*Work From Home*) dalam keadaan tertentu, yang dilindungi oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, instansi/perusahaan wajib menjamin kesehatan para pegawai melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pegawai.

Sementara itu di sektor pariwisata, Menko Luhut mengatakan Pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat di daerah-daerah tujuan



turis yang berstatus zona hijau. Adapun, Pemerintah secara resmi telah mengesahkan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Protokol tersebut disusun oleh Kemenparekraf bersama para pemangku kepentingan, serta kementerian terkait melalui koordinasi dari Kemenko Marves.

Protokol kesehatan disahkan melalui KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dan, Berikut daftar panduan protokol kesehatan bagi pengunjung tempat wisata pada era *new normal*;

-Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata.

-Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

-Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.

-Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.

-Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

-Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Kemudian, terkait protokol kesehatan di sektor transportasi yang sudah beroperasi, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamiluddin, yang mewakili Menko Luhut menyatakan, bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi terkait protokol kesehatan, dan demi pencegahan penularan covid-19. Regulasi tersebut adalah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, diperkirakan, sekitar 70 - 80 persen penularan covid-19 terjadi sektor transportasi, terutama transportasi publik. Hal-hal demikian yang terus menjadi fokus utama Kemenko Marves. Pemerintah pun terus berusaha untuk mengurangi semaksimal mungkin potensi penularan, sambil terus membuka peluang agar

roda perekonomian tetap berjalan. Sehingga muncul kebijakan protokol kesehatan yang mengatur pembatasan masyarakat di transportasi publik. "Di sini juga saya pastikan, bahwa tidak ada niatan sedikitpun pemerintah untuk merugikan badan usaha, sebab keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Harapannya kita justru tidak saling menyalahkan, akan tetapi ini adalah kondisi darurat, dan kita pun harus menerimanya sebagai, realitas sementara," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait kebijakan *shifting* kerja dan juga perihal rencana kebijakan Ganjil-Genap yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020, Deputy Ridwan berpendapat, agar kebijakan ini harus lebih disosialisasikan. "Saat ini juga sudah ada kebijakan *shifting* kerja, saya kira itu lebih baik, termasuk juga tetap produktif walau bekerja di rumah, pada ujungnya kualitas hidup kita juga lebih baik dan keselamatan kita terjaga, kepadatan lalu lintas juga berkurang. Artinya masyarakatnya yang kita atur mobilitasnya. Masyarakat juga harus berusaha hidup dengan pola yang lebih sehat, misalkan beralih ke sepeda, yang saya kira jalurnya itu sudah siap di seputar Sudirman-Thamrin, mungkin ke depan bisa lebih diperluas lagi. Terkait kebijakan itu saya kira harus lebih sosialisasikan lagi ke masyarakat," jelas Deputy Ridwan.

Sebelumnya, dalam suatu kesempatan, Menko Luhut juga pernah mengapresiasi sekaligus meminta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, untuk terus melakukan pembaruan data penanganan covid-19 di Indonesia secara berkala melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19. Karena menurutnya, data akurat akan menjadi acuan bagi dunia internasional menilai keseriusan Indonesia menangani pandemi ini.

"Saya titip Pak Doni aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 agar diperbarui terus. Karena itu akan menjadi acuan bagi dunia. Jadi acuan orang-orang yang di luar negeri yang mau datang ke Indonesia. World Bank berikan apresiasi kepada Indonesia. Saya paparkan mengenai penanganan covid yang dari Pak Doni. Mereka *happy* lihat itu," ujarnya.

Sekedar bahan renungan untuk selanjutnya dilaksanakan. Mensiasati, hidup berdampingan atau berdamai dengan covid-19, menurut Menko Luhut, esensinya dinilai sudah benar karena menurut WHO, pandemi covid-19 ini tidak akan habis sebelum ada vaksinnya. "Berdamai itu maksudnya adalah, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat," tutup Menko Luhut.



Era Tatanan Kehidupan Baru, Pemerintah Terus Fokus Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi Covid-19

Majalah Marves- Jakarta, Pemerintah Indonesia terus fokus pada pemulihan dan penanganan dampak dari pandemi covid-19. Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun telah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, PEN diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian. PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha selama pandemi. Khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), PEN juga ditargetkan untuk dapat menjaga kinerja UMKM yang kontribusinya cukup besar pada perekonomian Indonesia. Modal program PEN antara lain didapat dari Belanja Negara, untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan. Dukungan untuk UMKM sendiri sebesar 34,15 triliun rupiah untuk subsidi bunga, 28,06 triliun rupiah untuk insentif pajak, dan 6 triliun rupiah untuk penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM baru.

Penting diketahui, kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kemenkop UMKM, menyerap lebih dari 95 persen total tenaga kerja atau lebih dari 115 juta, berkontribusi pada 14,4 persen nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61 persen PDB nasional. Ada enam strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM, antara lain ; perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor.

Pemerintah pun bergerak cepat, salah satunya melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dimana belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengajak para Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) untuk bersama-sama bergabung dalam *platform* penjualan secara *online/ digital*.

Hal itu disampaikan usai diresmikannya Gerakan Nasional (Gernas) #BanggaBuatanIndonesia untuk #BeliProdukIndonesia, oleh Presiden Joko Widodo melalui *video conference*, Kamis, 14 Mei 2020. "Ini merupakan upaya mendorong penjualan produk ekonomi kreatif atau produk UMKM lainnya ke *platform online*. Langkah-langkah sekarang kita mulai promosikan ini, kerja sama semua lintas kementerian, ini semua pemain-pemain di dalam UMKM, pemerintah memfasilitasi untuk bisa semua masuk di dalam *online* ini," ujar Menko Luhut.

Dalam hal ini, Menko Luhut menjelaskan bahwa UMKM sendiri merupakan pilar dari perekonomian di Indonesia, serta memiliki peran penting akan hal itu. Oleh sebab itu, dirinya berharap semua UMKM dapat bergabung bersama-sama memajukan kualitas serta produk Indonesia. "Pemerintah memberikan pelatihan dan pemerintah juga memberikan 34,15 triliun rupiah yang diberikan kepada UMKM ini. Orang Inggris bilang "*chances never come twice*", kesempatan tidak datang dua kali, jadi Bapak Ibu ayo kita sungguh-sungguh, lakukan, manfaatkan, buat produk-produk Indonesia, cinta produk-produk Indonesia, kita beli produk Indonesia. Itu semua saya pikir hebat," tegasnya. Dengan bergabungnya UMKM ke *platform digital/ online*, lanjut Menko Luhut, diharapkan akan lebih memperkuat daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain. Hasilnya, Indonesia pun akan semakin diperhitungkan di mata dunia.

Kemudian, sebagai tindak lanjut, Menko Luhut juga pernah menyatakan, perlu ada upaya untuk pemulihan serta meningkatkan sektor pariwisata, khususnya upaya peningkatan kontribusi dari turis domestik, yang awalnya 50 persen menjadi 70 persen. "Bahwa turis domestik inilah yang mendorong dan menopang sektor pariwisata. Indonesia sendiri sebesar 54-56 persen ditopang oleh turis domestik dan sisanya dari

mancanegara," tambahnya. Dan, pada *forum virtual*, Webinar "Penyediaan dan Akses Permodalan Bagi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", pada Jumat, 12 Juni 2020. Menko Luhut juga menyerukan, kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya terdapat destinasi wisata prioritas, agar terus memonitor dan mengawal program pemulihan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Program Pemulihan UMKM dan Pariwisata, ini banyak yang bisa dimanfaatkan, ayo kita bekerjasama. Pemda harus mencari peluang, para pimpinan di daerah tolong terus memantau dan terus sosialisasikan kepada masyarakat, apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya nanti akan kita bantu," ujarnya.

la juga menegaskan agar semua pihak harus proaktif, dan mengerjakan segala sesuatunya secara holistik guna membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. "Tolong buat produk-produk asli daerah yang bagus, perkuat daya saing, berikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Ini akan kita dukung, dan perlahan tapi pasti akan terus kita kerjakan. Ayo, peluang ini harus dimanfaatkan," tambahnya.

Selain hal tersebut, belum lama ini, di hadapan 680 anak muda yang tergabung dalam Tim DANA Indonesia, atau DANAMAZE yang digelar via *video conference*. Menko Luhut juga mendorong agar generasi muda harus berkreatif dan menciptakan sesuatu yang dibanggakan. "Kalian para anak muda, harus ada kreasi, ciptakan kreasi. Jadi jangan hanya jadi sekrup, tetapi kalian harus menciptakan tempat untuk sekrup tersebut, kalian mengatur sedemikian rupa sekrup-sekrup tersebut, sehingga tercipta sesuatu yang hebat". Dalam acara tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan berbagai isu terkini yang mengemuka, termasuk menjabarkan berbagai upaya dan kerja total pemerintah guna pengendalian dan pemulihan ekonomi, dampak dari pandemi covid-19. "Pola hidup kita harus berubah menjadi

lebih sehat dan bersih. Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan ketahanan kesehatan. Budaya memakai masker, jaga jarak dan lebih sering mencuci tangan akan menjadi kebiasaan baru masyarakat kita," tambahnya.

Menko Luhut juga menjelaskan dukungan pemerintah untuk sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan juga peran dompet digital untuk distribusi logistik bagi masyarakat. "Platform penjualan *online* menjadi solusi karena mampu bertahan di tengah pandemi, namun banyak juga UMKM yang belum melek *online*, oleh karenanya kini saatnya kita bergotong royong merangkul UMKM. Kemudian, salah satu tantangan pemerintah, ialah jalur distribusi logistik, dompet digital akan sangat dipertimbangkan," jelas Menko Luhut.

Menko Luhut pun kembali berpesan, bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sangat diperlukan, dan peran anak-anak muda kreatif untuk turut mengkampanyekan hal tersebut kepada masyarakat juga sangat penting. "Itu penting untuk mengurangi kasus baru covid-19. Untuk pemulihan ekonomi, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah, agar semua K/L meningkatkan pembelian produk ekonomi kreatif, baik via *e-commerce* atau *e-catalogue* LKPP, sejalan dengan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia," ujar Menko Luhut.

Selain hal tersebut, masih ada beberapa skenario pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi covid-19. Di antara skenario itu yakni membangun industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi yang diyakini menjadi faktor penarik investasi ke Indonesia. hal itu seperti disampaikan Menko Luhut dalam diskusi Indonesia *Moving Forward* bertema Menjadikan Indonesia Tujuan Primadona Investasi Pascapandemi beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut Menko Luhut mengatakan, salah satu industri yang menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan baterai lithium menggunakan *raw mineral* Indonesia yang kaya akan nikel dan kobalt sebagai dua bahan utama baterai EV.

Berdasarkan riset, Filipina memiliki deposit nikel nomor dua setelah Indonesia. Diprediksi deposit nikel itu akan habis dalam dua tahun ke depan. Sehingga Indonesia akan menjadi pilihan utama bagi negara-negara yang berinvestasi di sektor pengembangan baterai lithium. Menko Luhut mengatakan, salah satu industri yang menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan baterai lithium

menggunakan raw mineral Indonesia yang kaya akan nikel dan kobalt sebagai dua bahan utama baterai EV. Optimisme Menko Luhut dalam pengembangan industri dari hulu ke hilir secara terintegrasi bukan tanpa alasan. Dia mengatakan, Indonesia memiliki cadangan mineral sebagai bahan baku industri yang cukup banyak jika dibanding negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Dan, berdasarkan data BPS, nilai ekspor besi baja Indonesia secara konstan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017 nilai ekspor besi baja senilai 3,3 miliar USD, meningkat menjadi 5,3 miliar USD pada 2018, dan 7,4 miliar USD pada 2019. Bahkan nilai ekspor besi baja melebihi ekspor kendaraan di kuartal pertama tahun 2020.

Data membuktikan, bahwa pembangunan industri dari hulu ke hilir, akan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Misalnya saja ekspor biji nikel pada 2018 mencapai 19,28 juta ton, dan bernilai 612 juta USD. Apalagi, saat biji nikel diolah menjadi *stainless steel slab*, volume ekspor menjadi sebesar 3,85 juta ton dengan nilai 6,24 miliar USD. "Ada peningkatan nilai ekspor sebesar 10,2 kali lipat di sini. Selama ini kita hanya ekspor *raw material*, ini yang coba diubah pemerintahan Jokowi sejak lima tahun ke belakang. Kita ingin hilirisasi nikel. Ini sudah kita mulai di Sulawesi dan Maluku," kata Menko Luhut.

Untuk membangun industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi tentu membutuhkan kerja sama dari pihak lain. Menko Luhut pun mengatakan, pemerintah akan membuka investasi bagi negara-negara lain yang bisa memberikan imbal balik bagi Indonesia. "Dalam investasi tentu ada *take and give*. Indonesia akan memprioritaskan investor yang mau turut membantu memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam mengelola sumber daya mineral. Harus ada transfer teknologi, hingga mendidik tenaga kerja lokal," pungkas Menko Luhut.

Dari sisi investasi dan sektor ketenagakerjaan, sejatinya Indonesia beruntung karena mempunyai industri yang menarik minat investor global.

"Nickel ore ribut karena tenaga asing, padahal itu buat ciptakan lapangan kerja, misal mereka datang 500 orang dan ciptakan lapangan kerja untuk 5000 orang, seperti Weda Bay, Harita, Konawe, Morowali, persisnya ada 5 tempat. dan nanti tahun 2024 akan menciptakan 50.000 lapangan kerja, dan kita akan ekspor 35 milyar USD itu angka fantastik untuk industri," jelas Menko Luhut. Dan dengan kebijakan transfer teknologi, secara langsung telah membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan, terutama di industri-industri strategis dan padat karya, antara lain di Weda Bay dan Morowali.

"Di 5 tempat itu katanya kita cukup tenaga ahli, kalo teknisi metalurgi kita tak cukup jadi kita

kirimkan mereka ke Tiongkok untuk belajar. Nah, bagaimana teknologi transfer itu. memang kita harus datangkan mereka dulu (TKA) dan tinggalnya hanya 6 bulan tergantung dengan keahlian masing-masing. Harus ada *rule of thumb*. semua investasi yang datang harus dengan nilai tambah industri, jadi kita tak mau ambil-ambil saja," tutup Menko Luhut.

Selanjutnya, terkait sektor kesehatan, PEN juga menasar sektor kemandirian nasional untuk memproduksi vaksin, Alat Perlindungan Diri (APD) dan obat-obatan lain untuk penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. "Pandemi ini juga mempercepat ekonomi di sektor kesehatan, apa yang ingin kita capai yaitu produksi dalam negeri untuk pembuatan vaksin dan obat-obatan," imbuhnya.

Ada beberapa pesan penting yang kerap diucapkan oleh Opung (panggilan khas dari para wartawan kepada Menko Luhut), yakni ; keteladanan dalam memimpin, jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, berbagi dengan sesama dan *team work*.

"Pemerintah akan terus berupaya dan mendukung apapun asalkan itu bermanfaat bagi masyarakat, pada ada ujungnya apapun yang kita kerjakan itu harus *team work*. Kita tidak bisa pintar sendiri, tapi bagaimana kita mengorganisir suatu organisasi itu, sehingga organisasi itu bisa betul-betul mencapai daya guna. Anda sekalian sebagai perwira nanti ujung-ujungnya kalian akan menjadi seorang pemimpin. Misteri kehidupan itu ada dan setiap orang memiliki blueprint hidup," ucap Menko Luhut, saat memenuhi undangan sebagai pembicara pada forum *virtual*, Kuliah Umum di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polri, Senin 15 Juni 2020.



“

Mari terus wujudkan persatuan dan keadilan sosial dengan bangga dan beli produk-produk buatan Industri Kecil Menengah (IKM). Kita jadikan IKM tuan rumah di negerinya sendiri. Tuan rumah yang bermartabat, berdikari, dan inovatif.

Luhut B. Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jadi Pahlawan Negeri dengan

**Bangga
Buatan
Indonesia**

#SemuanyaAdaDisini





Dunia Internasional Mengakui Indonesia Agresif Tangani Masalah Sampah

Menko Luhut : Kita Jangan Terlenna!

Majalah Marves-Jakarta, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menyatakan, dunia internasional sudah mengakui bahwa Indonesia sangat agresif dalam menangani permasalahan sampah. “Oleh karenanya, seluruh unsur baik pemerintah maupun masyarakat, jangan lantas terlenna dan justru harus bekerja lebih keras dan bahu membahu dalam menyelesaikan masalah sampah,” ujar Menko Luhut saat membuka *video conference* Rakor Penanganan Sampah Laut bersama para menteri, kepala lembaga dan BUMN terkait, di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020.

Lebih lanjut, arahan Menko Luhut dalam Rakor virtual tersebut, di antaranya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo adalah mengenai pemanfaatan teknologi pengumpul sampah di laut dan sungai, antara lain dengan menyiapkan kapal pengangkut sampah di setiap pelabuhan di bawah koordinasi PT Pelindo. “Supaya di setiap pelabuhan punya kapal pengangkut sampah, Pelindo koordinasi Menteri KP, kita harus mulai sekarang, galangan kapal manapun yang dipilih terserah, yang pasti yang terbaik untuk membangun kapal pengangkut sampah,” ujar Menko Luhut.

Hal tersebut direspon positif oleh Menteri KP, ia menyatakan siap dan akan menyediakan anggaran untuk melaksanakan arahan tersebut. Menteri KP juga berencana untuk membuat regulasi, agar setiap kapal penangkap ikan juga dapat mengumpulkan sampah di laut dan tidak hanya menangkap ikan saja. “Kami akan bangun kapal-kapal sampah, kami senantiasa siap, koordinasi antar kementerian pun akan kami pertahankan. Kemudian seluruh kapal ikan jangan hanya ambil ikan saja, tapi ambil sampah juga, regulasi akan kita buat,” jelasnya.

Kemudian, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menko Luhut memberi arahan terkait pemanfaatan teknologi RDF (*Refuse Derived Fuel*) untuk penanganan sampah. Menteri LHK lalu menjelaskan mengenai langkah-langkah strategis, antara lain, mengenai perlunya dibuat regulasi mengenai pembangunan RDF di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, lanjut Menteri LHK akan mencakup mengenai daftar daerah yang berpotensi untuk dibangun RDF, harga pembelian RDF oleh *offtaker*, kontribusi RDF dalam mengurangi gas rumah kaca dan pendalaman bersama kepada para pimpinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Serta, menyiapkan kelompok masyarakat dengan kegiatan Bank Sampah sebagai bagian sistem pengumpulan sampah, dan penerapan bertahap konsep pilah sampah,” ujarnya.

Selanjutnya, kepada Menteri ESDM, Menko Luhut mengarahkan agar segera dibuat pilot project untuk penerapan teknologi RDF. Menteri ESDM pun memberikan respon positif dan salah satu lokasi RDF berada di Cilacap, Jawa Tengah. “RDF Cilacap investasinya Rp 90 milyar, dengan kapasitas sebanyak 120 ton per hari. RDF itu dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pada industri semen,” ujar Menteri ESDM.

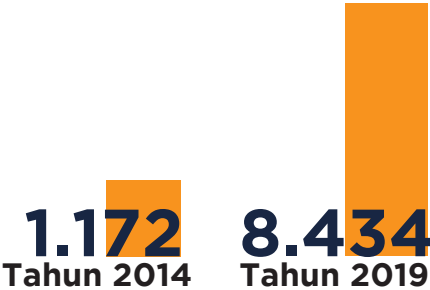
Adapun, RDF merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari pengolahan sampah dengan komposisi bahan yang mudah terbakar. Selain industri semen, RDF juga dapat digunakan untuk pembakaran di boiler berbahan bakar batu bara atau sangat tepat digunakan di PLTU. Kualitas RDF sebagai bahan bakar akan dipegaruhi oleh karakteristik sumber sampah sebagai bahan baku, sistem pengumpulan sampah, serta pengolahan yang dilakukan (*screening, sorting, grinding and drying*). Oleh karenanya peran aktif masyarakat dalam mendukung skema Bank Sampah akan sangat diperlukan dalam mendukung teknologi RDF.

Pertumbuhan Bank Sampah di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan, data terkini dari Kemen LHK, pada 2014 hanya ada 1.172 Bank Sampah, namun pada tahun 2019, Indonesia telah memiliki 8.434 Bank Sampah, dengan jumlah sampah yang terkelola sudah mencapai 3 juta ton lebih, dan nasabah Bank sampah sudah sebanyak 259.224 di tahun 2019.



Sumber Foto: JakartaPost

PERTUMBUHAN BANK SAMPAH DI INDONESIA



Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Plt Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti mengatakan, arahan dari Menko Luhut sedianya akan dilaksanakan oleh institusi terkait. Dan ia pun menggarisbawahi, bahwa pemerintah akan memprioritaskan kepada aksi langsung. "Tindak lanjutnya, tadi seperti arahan Pak Menko Luhut, seperti penyediaan kapal sampah yang akan dibuat oleh KKP, kemudian kapal pengumpul sampah di sungai dengan berkoordinasi dengan Kemen LHK. Lalu RDF akan berkoordinasi lintas kementerian, antara lain dengan Kemen ESDM, Kemen PUPR, dan Kemen LHK. Kemen ESDM juga akan berkoordinasi dengan PT Indonesia Power dan PT Semen Indonesia. Yang pasti pemerintah akan prioritas kepada aksi dan implementasi langsung," ujarnya.

Walau Pandemi, Penanganan Limbah

Plastik Terus Berlanjut

Meski tengah menghadapi pandemi COVID-19 atau Virus Corona, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak melupakan kebijakan-kebijakan lainnya, salah satunya mengenai penanganan limbah plastik. Hal itu diungkapkan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan saat menjadi pembicara kunci (*keynote speaker*) dalam sebuah konferensi *virtual* internasional yang bertajuk *Radically Reducing Plastic Pollution: Digital Launch of Indonesia's Multi-Stakeholder Action Plan* bersama *Global Plastic Action Partnership*. "Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan unvtuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional kami," kata Menko Luhut di Jakarta, Rabu 22 April 2020



Menko Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025.

Menurutnya, upaya pengurangan sampah plastik di laut ini harus dilakukan secara terintegrasi dalam lingkup nasional, regional, dan global, terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktifitas di darat.

Terkait acara ini, Menko Luhut mengatakan, Indonesia bergabung dengan *Global Plastic Action Partnership*, sebuah *platform* kolaborasi publik-swasta baru yang diluncurkan di *World Economic Forum* tahun lalu. Dari situ, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (NPAP), kemitraan inklusif dan digerakkan oleh solusi untuk mengatasi tantangan polusi plastik, dan kemitraan yang sama saat ini sedang dipersiapkan untuk Ghana, dan segera juga untuk Vietnam. “Melalui NPAP Indonesia, kami telah menciptakan platform untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terbaik Indonesia untuk menghadapi polusi plastik bersama-sama, dari peneliti ke bisnis dan masyarakat sipil. Dengan senang hati kami meluncurkan dan membagikan kepada Anda hari ini Rencana Aksi berbagai pemangku kepentingan (*multistakeholder*) NPAP dengan lima intervensi perubahan sistem yang dapat mendukung Indonesia untuk mengurangi 70% polusi plastik pada tahun 2025,” ungkapnya.

Intervensi tersebut antara lain mendesain ulang produk plastik dan kemasan dengan penggunaan kembali dan daur ulang bernilai tinggi, dan meningkatkan pengumpulan sampah plastik dengan meningkatkan sistem pengumpulan sektor yang didanai negara dan informal atau swasta. “Kami berharap Rencana Aksi Indonesia menjadi inspirasi dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, akan memicu kolaborasi dan komitmen yang lebih besar dari orang lain di panggung global. Visi ini melangkah lebih jauh, bahwa tujuan kami pada tahun 2040 adalah mencapai Indonesia yang bebas polusi plastik, yang mewujudkan prinsip *circular economy*, di mana plastik tidak lagi akan dibuang ke lautan, saluran air, dan tempat pembuangan sampah kami, tetapi akan berlanjut untuk memiliki kehidupan baru,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kristin Hughes,

Direktur Global Plastic Action Partnership yang juga anggota Komite Eksekutif *World Economic Forum* mengapresiasi langkah besar Indonesia ini dengan telah menunjukkan contoh kelas dunia tentang cara menangani masalah yang kompleks, yaitu polusi plastik, melalui pendekatan multipihak yang kolaboratif dan efisien. “Kami melihat bahwa kekuatan komunitas di Indonesia dan di seluruh dunia, menjadi semakin penting untuk bersatu dengan cara-cara baru dan kreatif, untuk secara terbuka bertukar keahlian dan pengalaman, serta bertindak secara serentak untuk memecahkan masalah paling mendesak yang dihadapi,” jelasnya.

Rencana Aksi berbagai pihak untuk mengurangi polusi dan sampah plastik di Indonesia ini telah disusun melalui konsultasi dan kolaborasi yang erat dengan ahli sampah plastik dan polusi plastik terkemuka di Indonesia, termasuk anggota Indonesia NPAP *Steering Board*, NPAP *Expert Panel*, lintas Kementerian dan Lembaga, serta para pemangku kepentingan utama lainnya. NPAP Indonesia beranggotakan lebih dari 230 organisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas bisnis dan investasi, masyarakat sipil dan kelompok advokasi pemuda, misi diplomatik asing, serta lembaga penelitian dan akademisi. Untuk menerjemahkan rekomendasi dalam Rencana Aksi menjadi aksi nyata, para anggota NPAP telah membentuk lima gugus tugas baru tentang kebijakan, inovasi, pembiayaan, perubahan perilaku, dan metrik, serta terus menangani masalah polusi dan sampah plastik melalui lembaga masing-masing.

Saya bangga mengumumkan bahwa Indonesia memilih bukan apa yang mudah, tetapi apa yang benar. Daripada bertahan dengan pendekatan “*business as usual*”, kami akan menerapkan pendekatan perubahan sistem penuh untuk memerangi limbah plastik dan polusi.

Luhut B. Pandjaitan
Menko Marves



Gerak Cepat Kemenko Marves Tanggapi Keluhan Masyarakat **Perihal Tagihan Listrik PLN**

Menjawab keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik PLN, yang dinilai "tidak wajar" oleh publik, direspon dengan cepat dan seksama oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Purbaya Yudhi Sadewa, yang langsung mengadakan Audiensi Virtual Penyampaian Aspirasi Masyarakat terkait Tagihan Listrik.

Untuk menjamin transparansi dan memenuhi harapan masyarakat, saya akan *sampling* 50 (lebih 10%) dari total (aduan) pengadu. Rekening pelanggannya akan saya lihat catatannya 12 bulan kebelakang. Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul *double check*. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan yang meragukan lagi

Purbaya Yudhi Sadewa
Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi

Majalah Marves-Jakarta, Menjawab keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik PLN, yang dinilai "tidak wajar" oleh publik, direpson dengan cepat dan seksama oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Purbaya Yudhi Sadewa, yang langsung mengadakan Audiensi Virtual Penyampaian Aspirasi Masyarakat terkait Tagihan Listrik, Jumat 12 Juni 2020.

"Sore ini saya mendengarkan langsung dari teman-teman yang katanya terbebani dengan kenaikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang gak kira-kira," ucap Deputi Purbaya mengawali audiensi dengan masyarakat.

Sebelumnya pada Selasa, 9 Juni 2020, Deputi Purbaya mempersilakan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan untuk melaporkan via email kepada dirinya dan tim. Berdasarkan laporan yang telah masuk, ada sebanyak 234 laporan pengaduan terhitung sampai dengan 11 Juni 2020 pukul 18:00 WIB. Segera, Deputi Purbaya dan tim langsung mengadakan audiensi dengan perwakilan masyarakat yang pengaduannya mewakili mayoritas laporan masuk.

Pada audiensi tersebut, terlihat mayoritas publik kecewa dengan kebijakan PLN yang dinilai sepihak dan minim sosialisasi, yang kemudian langsung ditanggapi secara serius oleh Deputi Purbaya. Karena menurutnya hal ini memang mendapatkan perhatian khusus dari Menko Luhut, yang tidak ingin menambah beban di masyarakat, yang *notabene* belum pulih sepenuhnya, dampak dari pandemi covid-19.

Dan berikut di antara laporan atau pengaduan langsung dari masyarakat :

"Penggunaan listrik saya dari *trendnya* cukup normal. Kami sekeluarga sejak Januari 2020 sudah stay di rumah dan dari situ kami tidak ada perubahan pada aktivitas dan kebiasaan. Namun pada tagihan Juni 2020 ada peningkatan tagihan sekitar 23%-51%" Lapor Bapak Anggana, salah satu peserta audiensi. Anggana mengaku heran dengan kenaikan tagihan tersebut, karena dirinya dan keluarga sudah melakukan anjuran di rumah aja sejak Januari 2020.

Tagihan rekening listrik yang tinggi tidak hanya terjadi pada rumah yang berpenghuni. Bapak Sabda Tuah, salah satu peserta audiensi, melaporkan bahwa rumahnya yang tidak berpenghuni, tapi anehnya dikenakan tagihan yang tinggi.

"Rumah saya di Pekanbaru baru selesai (dibangun) dan kami mendapatkan rekening listrik, namun rumah tersebut masih kosong belum kami huni. Tapi tagihan listrik yang masuk sampai dengan 1,5 juta rupiah padahal kan rumahnya kosong," jelasnya.

Selain rumah tempat tinggal, eskalasi tagihan listrik juga dialami pada tempat usaha milik salah satu peserta audiensi yang bernama Ibu Laela Indawati. Menurutnya, tagihan listrik rata-rata sebelum pandemi covid-19 sekitar 100 ribu rupiah sampai dengan 150 ribu rupiah. Namun pada tagihan bulan Juni 2020 tagihan yang masuk mencapai 559 ribu rupiah. Hal tersebut diakui oleh Laela sangat membingungkan, karena menurut pengakuannya semenjak Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) bengkel tempat usahanya tersebut sudah tidak ada aktivitas. "Dari Oktober 2019 sampai dengan Mei 2020, tagihan yang saya terima tidak jauh dari 1,2 juta sampai dengan 1,4 juta rupiah. Tapi di bulan Juni 2020 tagihannya sekitar 2 juta rupiah dalam keadaan kantor tutup. Ini bukan kami tidak ingin bayar, tapi lebih ke transparan saja, ini kenapa bisa ada kekurangan tagihan, kenapa melonjak tinggi" jelas Ibu Andriana. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengaduan melalui pusat panggilan PLN di 123 namun tidak ada penjelasan yang jelas.

Menanggapi pengaduan yang disampaikan, Deputi Purbaya meminta kesediaan para peserta audiensi untuk mengirimkan nomor rekening pelanggan serta foto KWH meter penggunaan untuk bukti penggunaan sebagai bahan pembandingan saat dilakukan investigasi ke PLN. "Saya adakan forum ini, karena kami ingin melihat seperti apa, kami ada di tengah dan tidak ingin mencari siapa yang salah, namun mencari solusi terbaik. Nanti saya kirimkan tim ke PLN, kita cocokkan juga meterannya. Nanti saya akan bawa tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga, untuk memastikan tidak ada kebocoran," ujar Deputi Purbaya menjelaskan mengapa pihaknya membutuhkan nomor rekening pelanggan para peserta audiensi.

Berikan kami waktu 1 - 2 hari kerja untuk melakukan pengecekan kepada PLN. Saat ini kami belum bisa menyimpulkan sebelum ada pemeriksaan kembali dengan data di PLN. Kami akan jalan betul-betul melihat seperti apa yang terjadi." Terang Deputi Purbaya. Sebelum menutup, Deputi Purbaya menginformasikan bahwa perkembangan selanjutnya akan dikabarkan melalui email

atau akan diadakan audiensi serupa jika diperlukan.

Tindaklanjuti Isu Kenaikan Tarif Listrik, Kemenko Marves Dengar Penjelasan ESDM dan PLN

Tak menunggu lama, Deputi Purbaya kembali mengadakan rapat koordinasi virtual terkait isu kenaikan tarif listrik, pada Rabu 17 Juni 2020. Forum ini guna menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik yang masuk ke alamat surat elektronik pengaduanenergi@maritim.go.id.

Dalam rapat tersebut Deputi Purbaya meminta masukan dari Kementerian ESDM dan penjelasan dari PLN mengenai apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang sudah dilakukan PLN untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik tersebut. "Siang ini saya ingin mendengar masukan dari Kementerian ESDM, kalau sudah ada investigasi, apa yang terjadi sekarang, nanti saya juga akan tanya PLN apa tindakannya", kata Deputi Purbaya mengawali rakor.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi lalu menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi karena dampak penerapan PSBB yang mengakibatkan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pascabayar tidak bisa dilakukan. "Baca meter ini sangat terkait covid-19 pak. Saat itu sudah mulai PSBB sehingga untuk menjaga protokol kesehatan, PLN bermaksud melakukan langkah-langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Hendra.

Oleh karena itu, menurutnya, PLN melakukan skema penghitungan rata-rata konsumsi listrik selama 3 bulan terakhir. Ia juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sampai saat ini. Ini dibuktikan dengan tarif listrik yang masih sama yakni Rp1.467 per kWh. "Dengan sangat terpaksa ada yang dirata-ratakan, nanti PLN bisa jelaskan. Kami hanya meng-clearkan aja bahwa dari pemerintah tarif listrik tidak naik", katanya.

Sejalan dengan ESDM, Executive Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Edison Sipahutar mewakili Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan juga memberikan penjelasannya. Ia memastikan bahwa tarif listrik sejak Januari 2017 tidak pernah

mengalami kenaikan. Kenaikan tagihan listrik pelanggan menurutnya terjadi karena adanya peningkatan pemakaian kWh pelanggan itu sendiri. "Dengan adanya PSBB membuat aktivitas di rumah menjadi lebih tinggi baik sekolah yang dilakukan melalui *online* maupun aktivitas kantor yang juga dilakukan dari rumah atau *work from home*. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kenaikan pemakaian listrik," katanya.

Menurut Edison, PSBB membuat sebagian besar petugas PLN tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk pencatatan meter pelanggan, maka pada bulan April dan Mei, PLN melakukan penghitungan rata-rata listrik 3 bulan. "Untuk rekening Juni, sebagian besar petugas sudah melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan. Padahal pemakaian bulan Maret yang ditagihkan pada rekening listrik April, begitu juga pemakaian bulan April untuk rekening Mei sudah terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah, sehingga terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan menggunakan rata-rata 3 bulan. Sebagian besar realisasi pemakaian listrik lebih besar daripada yang ditagihkan," katanya.

Ia melanjutkan, selisih inilah yang kemudian ditagihkan pada rekening Juni saat PLN telah melakukan pencatatan riil, baik melalui petugas catat meter ataupun laporan mandiri pelanggan melalui *whatsapp*.

"Gambarannya begini, pemakaian pelanggan listrik pada Desember 55 kWh, Januari 50 kWh, dan Februari 45 kWh, maka pemakaian di bulan Maret yang ditagihkan di bulan April rata-ratanya sebesar 50 kWh. Kemudian untuk tagihan Mei jika dirata-ratakan akan mendapatkan 48 kWh," jelasnya. Dan, jika diasumsikan selama pandemi pemakaian listrik meningkat dan sama tiap bulannya yaitu sebesar 70 kWh, maka ada kekurangan tagih pada pemakaian bulan Maret 20 kWh, bulan April kurang 22 kWh, dan pemakaian bulan Mei 70 kWh, sehingga tagihan di bulan Juni menjadi 112 kWh. "Inilah yang membuat peningkatan kWh akibat skema rata-rata 3 bulan, juga karena ditetapkan PSBB, dan ditambah pada bulan Mei adalah Bulan Ramadhan yang mengakibatkan banyak aktivitas di rumah yang memakai listrik," tambahnya.

Edison menambahkan, hal tersebut membuat pelanggan kaget namun sesungguhnya itu adalah pemakaian yang

riil setelah PLN bisa melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan. "Untuk mengatasi hal tersebut, PLN memberlakukan perlindungan terhadap yang mengalami pelonjakan tarif listrik sebesar 20% keatas. Sehingga pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40% dari kenaikan tagihan. *Carry over* sebesar 60% dari kenaikan diangsur 3 kali mulai rekening Juli 2020," terangnya.

Mendengar klarifikasi langsung dari Kementerian ESDM, ditambah dengan penjelasan PLN, Deputi Purbaya lalu mengatakan bahwa yang telah dilakukan oleh PLN sudah cukup fair, namun memang komunikasi dan sosialisasinya masih kurang lancar. "Untuk menjamin transparansi dan memenuhi harapan masyarakat, saya akan sampling 50 (lebih 10%) dari total (aduan) pengadu. Rekening pelanggannya akan saya lihat catatannya 12 bulan kebelakang. Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul *double check*. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan yang meragukan lagi", ungkap Deputi Purbaya.

Tidak hanya itu, guna memastikan validitas data dan verifikasi, Deputi Purbaya juga akan meminta data pelanggan yang dijadikan sampel dari sistem PLN dan akan meminta BSSN untuk memeriksa sistem PLN untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN. Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel.

Banyak kalangan, terutama insan media, yang mengapresiasi langkah taktis Kemenko Marves, dengan "menjemput bola" dan tidak menunggu kebingungan masyarakat menjadi semakin besar. Suatu langkah sederhana, dengan tujuan tidak mencari siapa yang salah, namun dari situlah masyarakat akhirnya dapat berinteraksi langsung, dan kemudian dicarikan solusinya bersama.



Insentif Bagi Masyarakat

Secepatnya Disalurkan dan Tepat Sasaran

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, sinkronisasi data nelayan terdampak pandemi agar segera dikebut dan insentif secepatnya disalurkan bagi seluruh masyarakat nelayan yang terdampak pandemi covid-19.

Sesuai arahan Presiden segera disatukan datanya. Jadi isu utama saat ini memang masalah data. Sekarang kita semua sedang sinkronisasi datanya. Satu juta nelayan itu harus masuk ke dalam sistem yang akan diberikan bantuan

Safri Burhanuddin
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Safri Burhanuddin pun memastikan, Kemenko Marves beserta kementerian terkait tengah mempercepat proses pendataan. "Sesuai arahan Presiden segera disatukan datanya. Jadi isu utama saat ini memang masalah data. Sekarang kita semua sedang sinkronisasi datanya. Satu juta nelayan itu harus masuk ke dalam sistem yang akan diberikan bantuan," ujar Deputi Safri dalam Dialog Indonesia Bicara, Rabu 03 Juni 2020.

Ihwal pemberian BLT ini, Deputi Safri mengatakan, awalnya pemerintah ingin memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk sarana dan prasarana. Namun di kondisi pandemi Covid-19, bantuan itu dinilai kurang cocok sehingga diputuskan dalam bentuk tunai. "Tadinya kita berencana akan bagi dua. Apakah semua berbentuk BLT atau sebagian berbentuk sarana dan prasarana untuk nelayan. Kemarin diputuskan sementara kita akan tetap memberikan bantuan dalam bentuk cash. Karena prasarana saat ini belum tentu mereka butuhkan sekali." pungkasnya.

Kebangkitan Industri Perikanan Dengan Pasar Online

Pada kesempatan yang sama, Deputi Safri juga menjelaskan, pandemi global ini pun membuat permintaan dari luar negeri menurun sekitar 40%, dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh, sehingga membuat perusahaan mengurangi persediaan bahan baku. Selain itu, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10%.

Meski dihadapkan pada suasana tidak menentu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Safri Burhanuddin mengaku optimis industri perikanan Indonesia bisa segera bangkit dengan menasar pasar *online*. "Kita salah satu negara dengan potensi perikanan yang luar biasa. Memang saat ini kondisi pasar turun, tapi kalau kita memanfaatkan teknologi, seharusnya tidak masalah. Pasar *online* luas, kita melihat potensi dari perikanan. Ini peluang yang besar untuk kita manfaatkan bersama," tambahnya.

Selain mengincar pasar *online*, lanjut Deputi safri, pemerintah juga terus berupaya membuka pasar ekspor. Deputi Safri mengatakan, pemerintah telah melakukan ekspor ikan ke sejumlah negara meski masih dalam masa pandemi. "Ekspor ikan kemarin sempat terhenti, sekarang sudah jalan lagi. Ekspor ikan kita selama 2 minggu sampai 3

minggu ini sudah mulai terbuka lagi, karena beberapa negara sudah mulai membuka. Sekitar 40 sampai 60 persen kita sudah mulai ekspor," terangnya.

Karena itu, Deputi Safri mengatakan pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar roda ekonomi nelayan tetap berputar. Pemerintah, lanjut Deputi Safri, juga terus berupaya membuka akses pasar domestik maupun luar negeri agar hasil tangkapan nelayan bisa terserap. "Tugas pemerintah menjamin kelancaran produk mereka sampai ke pembeli. Jika restoran mulai dibuka awal Juli, kemampuan menyerap pasar itu akan kami beritahukan. Jangan sampai ada ikan yang tidak termanfaatkan atau terbuang," ucapnya.

Pangkas Regulasi Yang Menghambat

Kemudian, masih menurut Deputi Safri, banyaknya regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, menjadikan masyarakat enggan menekuni sektor perikanan budidaya. "Banyak keluhan dari masyarakat soal banyaknya regulasi. Pemerintah di sini tugasnya menyederhanakan regulasi. Contoh kalau mau budidaya udang saja ada 21 ijin yang harus diurus. Gimana orang mau budidaya kalau lihat regulasinya panjang begitu. Setiap kementerian, daerah, ada ijin. Kami bekerja sama dengan KSP dan KKP untuk sederhanakan regulasi," jelasnya.

Selain memangkas regulasi, pemerintah juga tengah melakukan intensifikasi terhadap lahan-lahan budidaya yang dimiliki masyarakat. Pemerintah juga akan menetapkan fokus komoditas budidaya unggulan di tiap-tiap daerah, hingga membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu. "Komoditas perikanan kan banyak. Kami sarankan agar kita fokus setidaknya lima komoditas saja. Sehingga kita bisa kembangkan berdasarkan market intelligentya. Kita cek dulu marketnya seperti apa, kompetitornya siapa. Pemerintah bisa bantu kita konsentrasi di satu tempat yang terintegrasi. Kalau semua terintegrasi mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, listrik, industri, akses perbankan dan pelabuhannya ada di satu lokasi, untuk menurunkan harga produksi mudah dan tentu harga kita akan bersaing di pasar," pungkas Deputi Safri.

Kemenko Marves di bawah kepemimpinan Menko Luhut, terus dan terus mengoptimalkan seluruh jajarannya dan juga berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, agar terus bekerja total, bersungguh-sungguh, bekerja secara cerdas dan ikhlas, kerahkan segenap kemampuan yang ada, demi masyarakat, utamanya masyarakat yang paling terdampak pandemi.





Pemerintah Terus Lanjutkan Proyek Infrastruktur Prioritas Untuk Rakyat

Menjawab berbagai pertanyaan yang sempat mengemuka ke publik, perihal kelanjutan berbagai proyek infrastruktur, utamanya berbagai proyek infrastruktur prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamiluddin dengan tegas menyatakan, *disruption* besar (dampak pandemi global covid-19) yang terjadi saat ini, sejatinya tidak boleh membuat semua pihak menyerah. Menurutnya, yang wajib diutamakan dalam kondisi saat ini adalah adaptasi dan menyiasatinya.

Hakikat dari penyediaan infrastruktur ini, dan ini harus terus berjalan. Strateginya, ada beberapa yang direschedule, yang prioritas yang kami utamakan, yang jelas berbagai proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas akan kami teruskan, termasuk apabila diperlukan penataan dan penjadwalan ulang.

Ridwan Djamaluddin

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Majalah Marves- Jakarta, Menjawab berbagai pertanyaan yang sempat mengemuka ke publik, perihal kelanjutan berbagai proyek infrastruktur, utamanya berbagai proyek infrastruktur prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin dengan tegas menyatakan, *disruption* besar (dampak pandemi global covid-19) yang terjadi saat ini, sejatinya tidak boleh membuat semua pihak menyerah. Menurutnya, yang wajib diutamakan dalam kondisi saat ini adalah adaptasi dan menyiasatinya. "Menurut saya berbagai proyek strategis nasional ini bukan sebuah angan-angan, tetapi juga sebagai kebutuhan, dan kebutuhan itu kan harus kita penuhi. Perihal anggaran pemerintah sebagian besar untuk penanganan covid-19, namun bukan berarti pembangunan berbagai infrastruktur itu harus dihentikan, sebab ini untuk kebutuhan jangka panjang masyarakat," ujarnya Dalam Dialog Indonesia Bicara yang dipandu dan disiarkan oleh TVRI, Rabu 17 Juni 2020.

Ia juga mengatakan, pemerintah ingin semangat untuk terus aman namun produktif itu terus dijaga. Artinya, lanjut Deputi Ridwan, roda perekonomian harus tetap berjalan dan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. "Itulah hakikat dari penyediaan infrastruktur ini, dan ini harus terus berjalan. Strateginya, ada beberapa yang direschedule, yang prioritas yang kami utamakan, yang jelas berbagai proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas akan kami teruskan, termasuk apabila diperlukan penataan dan penjadwalan ulang. Prioritasnya, berbagai proyek konektivitas, antar-Pulau Jawa dan antara Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya, itu yang akan menjadi prioritas. Dan, beberapa proyek nasional terus berjalan, apalagi yang sifatnya ada komitmen dengan internasional," tambahnya.

Sebagai gambaran Deputi Ridwan mencontohkan, walaupun dari segi keekonomian kurang menguntungkan, contohnya, pemerintah membangun bandara di wilayah Papua. "Walaupun keekonomiannya kurang, akan tetapi di sana banyak masyarakat yang membutuhkan untuk distribusi logistik dan mobilisasi masyarakat, maka itu wajib kita penuhi," jelasnya.

Sebagai informasi, mengutip dari laman resmi Kementerian PU-PR, pu.go.id, Kemen PU-PR melakukan strategi penjajakan minat pasar (*market sounding*) melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk enam proyek infrastruktur senilai Rp 80,84 triliun. Penyelenggaraan *market sounding* ini sangat penting dalam menjaga

optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan di tengah Pandemi COVID-19, dalam rangka memperlancar distribusi bahan pokok, mengurangi biaya logistik, menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka lapangan pekerjaan serta mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

Menteri PUPR Basuki mengatakan pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai "*backbone*" dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia. Penyelenggaraan *market sounding* juga menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, khususnya saat masa sulit Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. "Apa yang tengah kita kerjakan sekarang adalah bagian dari persiapan kita untuk dapat segera *take off* saat Pandemi COVID-19 ini berakhir. Jadi dari sekarang sudah harus kita mulai persiapannya agar kita bisa langsung bekerja setelah pandemi ini berlalu," ujarnya belum lama ini.

Diharapkan, keenam infrastruktur yang ditawarkan mendapat sambutan positif para investor karena memiliki prospek investasi yang baik dan kehadirannya sudah ditunggu oleh masyarakat. Misalnya Jalan Tol Akses Patimban yang tersambung dengan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Pelabuhan Patimban yang segera menjadi pelabuhan cargo terutama untuk ekspor mobil. Kemudian juga Jalan Tol Semarang Harbour yang akan menghubungkan antara kawasan industri di wilayah Kendal dengan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Tol tersebut akan berhubungan langsung dengan Tol Semarang - Demak sehingga terjalin sistem jalan tol untuk logistik yang baik. Termasuk juga pembangunan Jembatan Batam Bintan yang diharapkan semakin membuka peluang pengembangan kawasan industri dan kawasan pariwisata yang bertumpu pada keindahan alam di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun, *market sounding* ialah forum yang diinisiasi Pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada pasar atau calon investor. Selain itu juga untuk menjangkau masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau *Government Contracting Agency*.

Protokol Kesehatan Sektor Transportasi

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut Deputi Ridwan juga menjelaskan berbagai moda transportasi yang sudah beroperasi. Ia

menyatakan, bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi terkait protokol kesehatan, demi pencegahan penularan covid-19.

“Diperkirakan, sekitar 70 – 80 persen penularan covid-19 terjadi sektor transportasi, terutama transportasi publik. Hal-hal demikian yang terus menjadi fokus utama kita, pemerintah pun terus berusaha untuk mengurangi semaksimal mungkin potensi penularan, sambil terus membuka peluang agar roda perekonomian tetap berjalan. Sehingga muncul kebijakan protokol kesehatan yang mengatur pembatasan masyarakat di transportasi publik,” ujar Deputy Ridwan.

“Di sini juga saya pastikan, bahwa tidak ada niatan sedikitpun pemerintah untuk merugikan badan usaha, sebab keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Harapannya kita justru tidak saling menyalahkan, akan tetapi ini adalah kondisi darurat, dan kita pun harus menerimanya sebagai, realitas sementara,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait kebijakan shifting kerja dan juga perihal rencana kebijakan Ganjil-Genap yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020, Deputy Ridwan berpendapat, agar kebijakan ini harus lebih disosialisasikan.

“Saat ini juga sudah ada kebijakan shifting kerja, saya kira itu lebih baik, termasuk juga tetap produktif walau bekerja di rumah, pada ujungnya kualitas hidup kita juga lebih baik dan keselamatan kita terjaga, kepadatan lalu lintas juga berkurang. Artinya masyarakatnya yang kita atur mobilitasnya. Masyarakat juga harus berusaha hidup dengan pola yang lebih sehat, misalkan beralih ke sepeda, yang saya kira jalurnya itu sudah siap di seputar Sudirman-Thamrin, mungkin ke depan bisa lebih diperluas lagi. Terkait kebijakan itu saya kira harus lebih sosialisasikan lagi ke masyarakat,” tambahnya.

Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung - Surabaya

Sebelumnya, dalam forum konferensi pers virtual bersama awak media, Senin 15 Juni 2020, Deputy Ridwan menjelaskan mengenai perkembangan terbaru proyek Kereta Api cepat Jakarta - Bandung yang secara keseluruhan saat ini masih terus berjalan. Pun, proyeknya pun sudah cukup maju. “Beberapa kendala kalau terkait dengan Covid-19 saya kira hari ini tidak ada yang tidak terkait, yang penting adalah antisipasi kita untuk menyelesaikannya. Memang ada mobilitas dan pengadaan infrastruktur yang terkendala”, jelasnya.

Namun, tambah Deputy Ridwan, secara umum proyek jalan terus. Pembebasan lahan yang belum 100% masih ada sedikit kendala juga sudah terlihat titik terang penyelesaiannya. Untuk kereta api Jakarta - Surabaya menurut deputy Ridwan, terlepas Indonesia sedang bermitra dengan Jepang untuk studinya, namun keputusan soal mitra baru berada di tangan pemerintah Indonesia. “Yang paling penting dia efisien dan kalau sudah terbangun nanti dia memberikan tawaran yang baik bagi masyarakat, yang menguntungkan tentunya”, kata Deputy Ridwan. Jika di tengah perjalanan, tambah Deputy Ridwan ada mitra baru yang membawa manfaat dan semua pihak setuju, ini tentunya tidak tertutup.

Progres Ibu Kota Baru

Di tanya mengenai progress perencanaan Ibu Kota Baru oleh Media, Deputy Ridwan menjelaskan bahwa statusnya masih sama yaitu pematangan perencanaan. Seperti diketahui sebelumnya, keputusan pemerintah untuk pemindahan ibu kota baru ini sudah solid. Bahkan sebelum ada Covid-19 ini, menurut Deputy Ridwan arahan umum terkait Ibu Kota baru ini yaitu melakukan percepatan dan percepatan. “Dalam tatanan persiapan, secara teknis sudah tergambar hanya memang ada beberapa sisi seperti pertama, pendalaman data ini harus lebih dilakukan. Kedua, skema smart city yang akan dibangun sudah tergambar secara visual namun secara teknisnya sedang dimatangkan”, tuturnya.

Berikutnya terkait dengan Investasi, Deputy Ridwan mengatakan pemerintah harus melakukan pemilahan investasi terkait proyek Ibu Kota baru ini. “Mana yang akan disediakan oleh pemerintah dan mana pula yang akan kita undang investor swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi. Terakhir perencanaannya masih sampai di sana”, kata Deputy Ridwan.

Kendaraan Listrik

Disinggung mengenai kendaraan listrik, Deputy Ridwan menjelaskan secara prinsip pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk mendorong mengenai penggunaan kendaraan listrik, termasuk membangun industri kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya di Indonesia. “Ada tiga sisi yang perlu kita lakukan, satu kita harus mencari cara supaya impor BBM berkurang, kedua ramah lingkungan kita harus mengurangi pembakaran BBM.

Ketiga kita harus menggunakan kapasitas terpasang listrik kita”, jelasnya.

Selain itu jelas Deputy Ridwan, Indonesia punya kelebihan tentang ketersediaan bahan baku untuk membuat baterai. Kemudian pemerintah juga menginginkan pasar besar Indonesia untuk otomotif dapat juga dinikmati oleh industri nasional sehingga dapat mendorong pemain dalam negeri yang ingin membangun kendaraan bermotor listrik.

Untuk memicu itu semua, menurut Deputy Ridwan memang ada fasilitas yang dilakukan salah satunya yaitu memberikan kemudahan dalam bentuk insentif-insentif. “Jadi, sebelum kendaraan listrik nasional bisa kita bangun di dalam negeri kita dorong agar dapat dimudahkan mendatangkan kendaraan bermotor listrik dari luar atau impor dalam jumlah tertentu dan waktu periode tertentu”, ungkap Deputy Ridwan

Terkait kendaraan listrik ini, untuk prioritas Indonesia adalah kendaraan bermotor berbasis baterai. Menurutnya kendaraan bermotor listrik yang lain tidak difasilitasi lebih banyak. “Saat ini terus berlangsung pembangunan infrastruktur pengisian, listriknya juga sudah berlangsung, beberapa perusahaan sudah mulai. Dan yang menarik industri dalam negeri sudah memperlihatkan kapasitasnya, misalnya BPPT sudah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik sendiri dan sudah dimanfaatkan”, katanya. Jadi artinya, tambah Deputy Ridwan rencana pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri masih terus berlangsung sampai saat ini.



Amanat Gaungkan Kembali Gerakan Indonesia Bersih Saat Pandemi

Deputi Nani: Ini Adalah Keharusan dan Masyarakat Wajib Mematuhinya

Majalah Marves-Jakarta, Menjadi satu-satunya Deputi Wanita di bawah komando Menko Luhut, tidak lantas membuatnya ragu dan lamban bertindak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti justru membuktikan dan tetap berkomitmen untuk terus gaungkan Gerakan Indonesia Bersih. Hal itu dilakukannya dalam rangka meminimalisasi dampak covid-19 di masyarakat dan menyongsong era kenormalan baru (*new normal*) yang akan bergulir dalam waktu dekat.

Ia mengatakan, sebelum covid-19 masuk Indonesia, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih GIB sebagai standar protokol kesehatan masyarakat. GIB merupakan turunan dari Gerakan Revolusi Mental yang kemudian diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. "Tugas itu diberikan kepada Kemenko Marves. Jadi kita sudah dua tahun mengawal Gerakan Indonesia Bersih melalui berbagai program yang utamanya adalah edukasi karena kaitannya dengan perubahan perilaku," kata Deputi Nani di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2020.

Dua tahun mengawal GIB bukanlah pekerjaan mudah, namun bukan berarti menyerah, Deputi Nani mengakui Kemenko Marves masih menemui berbagai kendala dalam membiasakan perilaku hidup bersih di masyarakat.

Kini, kondisi berubah dunia tak terkecuali Indonesia tengah menghadapi wabah covid-19. Karenanya, kata Deputi Nani, masyarakat harus taat menerapkan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, hingga menjaga jarak "Perubahan perilaku menjaga kesehatan itu kalau di

negara lain seperti Jepang butuh sekitar 20 tahun. Kaitannya dengan masa pandemi covid-19 ini, kita melihat sekarang individu bergerak dipaksa bergerak. Kami juga harus terus menerus mengampanyekan gaya hidup sehat untuk menghindari penyebaran virus," ucapnya.

Limbah Medis Meningkat Karena Covid-19

Selain terus mengampanyekan Gerakan Indonesia Bersih, Kemenko Marves bersama sejumlah kementerian terkait juga tengah mengatasi sampah plastik. Berdasarkan catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sampah plastik domestik (rumah tangga) di Indonesia meningkat di masa pandemi covid-19. Dalam kondisi normal biasanya setiap individu menghasilkan 1 - 5 gram sampah plastik per hari. Sementara di masa pandemi ini jumlahnya meningkat menjadi 5 - 10 gram per hari. "Karena kerja dari rumah, pesan makanan *online* yang rata-rata makanannya dibungkus dengan plastik, jadi meningkat. Untuk limbah plastik nonmedis ini kita akan dorong ke circular ekonomi artinya di *reuse, reduce, dan recycling*," katanya.

Selain limbah domestik, pemerintah juga tengah mencari solusi terkait limbah medis yang angkanya juga meningkat selama masa pandemi.

Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini Indonesia memproduksi 290 ton limbah medis per hari. Dari angka tersebut, sekitar 50% atau 140 ton merupakan limbah covid-19. Sementara kapasitas pengelolaan limbah medis seluruh Indonesia sebesar 170 ton per hari. "Artinya ada gap. Dan, gap ini yang

nanti kita dengan KLHK sebagai pelaksana akan menjalin kerja sama. Mendorong teknologi-teknologi *incinerator* yang bisa membakar limbah medis ini agar tidak terdampak ke lingkungan," jelas Deputi Nani.

Revitalisasi dan Rehabilitasi DAS Citarum Wajib Dituntaskan

Sebelumnya, atau tepatnya pada tanggal 08 Mei 2020, komitmen tersebut telah dibuktikan melalui Pelaksanaan program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagaimana telah diamanatkan oleh Perpres 15 Tahun 2018, yang masih tetap dilaksanakan, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. Namun demikian, dalam pelaksanaan program di lapangan tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan dalam pengendalian Covid-19, termasuk mengurangi aksi yang melibatkan masyarakat secara massal.

Selain melaksanakan program-program sebagaimana yang telah direncanakan, Satgas DAS Citarum yang didukung oleh para Komandan Sektor dan anggota TNI di lapangan juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pandemi Covid-19 dan pentingnya budaya hidup bersih dan sehat, serta secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan warga sekitar sungai, juga memberikan bantuan seperti masker, *hand sanitizer* serta paket sembako bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat wabah pandemi ini.

Pada awal bulan April 2020 telah terjadi bencana banjir Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan

Perubahan perilaku menjaga kesehatan itu kalau di negara lain seperti Jepang butuh sekitar 20 tahun. Kaitannya dengan masa pandemi covid-19 ini, kita melihat sekarang individu bergerak dipaksa bergerak. Kami juga harus terus-menerus mengkampanyekan gaya hidup sehat untuk menghindari penyebaran virus

Nani Hendiarti

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Bojong Soang. Akibat bencana banjir ini terdapat sekitar 15.265 jiwa (3.715 KK) yang terdampak dan 223 jiwa di antaranya telah berada di lokasi pengungsian.

Sebagai bentuk kepedulian terkait penanganan Covid-19 juga bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyerahkan bantuan berupa 20.000 unit masker dan 50 liter *hand sanitizer* yang ditujukan khususnya kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para Anggota Satgas yang bekerja di lapangan dan juga masyarakat. Acara serah terima ini secara simbolis diselenggarakan pada Rapat Koordinasi Penanganan DAS Citarum melalui *Video Conference* pada Jumat 8 Mei 2020.

Revisi Anggaran Tahun 2020 dan Penyesuaian Rencana Aksi

Tahun 2020 ini, yang merupakan tahun ke-3 penanganan DAS Citarum seyogianya merupakan periode yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun adanya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pengurangan anggaran yang sangat signifikan. Kebijakan melakukan *refocusing* anggaran pemerintah tahun 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 memberikan dampak pada perubahan rencana kegiatan dan anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan oleh K/L dan Pemerintah Daerah dalam penanganan DAS Citarum.

Tercatat bahwa alokasi anggaran yang sudah dianggarkan melalui beberapa K/L dan Pemerintah Daerah sebagai hasil *refocusing* hanya tersisa sekitar 15% dari anggaran sebelumnya, atau bahkan hanya sekitar 7% dari kebutuhan anggaran tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi DAS Citarum 2019-2024. "Adanya *refocusing* anggaran pemerintah pada masa pandemi serta beberapa tahun kedepan akan mempengaruhi capaian kinerja penanganan DAS Citarum sebagaimana ditargetkan dapat selesai selama 7 tahun (2019-2024)," jelas Deputi Nani.

Oleh karena itu, melalui serangkaian rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves bersama Satgas DAS Citarum selama masa *Work From Home*

(WFH) ini, telah disepakati beberapa strategi dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan alokasi anggaran yang masih tersedia, serta mendorong pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas secara efektif dan efisien;
2. Melaksanakan kegiatan di lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19;
3. Menyusun prioritas dan melaksanakan rencana kegiatan yang tidak memerlukan anggaran besar namun memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan pencapaian kinerja Penanganan DAS Citarum;
4. Mendorong sumber pendanaan lain di luar APBN dan APBD, termasuk berkolaborasi dengan mitra (swasta);
5. Mengoptimalkan pelaksanaan program di DAS Citarum melalui program padat karya yang saat ini didorong oleh pemerintah sebagai strategi pemulihan ekonomi masyarakat;
6. Melakukan review dan penyesuaian Dokumen Rencana Aksi DAS Citarum 2019-2024.

"Kita menyadari bahwa anggaran pemerintah untuk tahun ini dan beberapa tahun kedepan akan fokus pada upaya mengembalikan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, sehingga skenario perencanaan penanganan DAS Citarum pun harus ditinjau ulang. Namun demikian, kita masih tetap optimis dan semangat untuk mengawal dan mendorong perbaikan kualitas ekosistem DAS Citarum sesuai dengan target 7 tahun sebagaimana telah dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo," pungkas Deputi Nani.

Gerakan Indonesia Bersih

#BeatPlasticPolution
#BeAGameChanger



Pemerintah Kembangkan Pariwisata *In City* dan Terapkan Protokol Kesehatan Untuk Pulihkan Sektor Pariwisata

Ada kecenderungan masyarakat melakukan perjalanan di satu kota atau in city. Kita bekerjasama dengan pemda dan sejumlah pihak terkait menyediakan paket pariwisata in city dengan menyiapkan protokol kesehatan yang ketat.

Odo RM Manuhutu

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Majalah Marves-Jakarta, Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu mengatakan, salah satu skenario yang tengah disiapkan pemerintah adalah mengembangkan destinasi wisata satu kota atau *in city*.

Deputi Odo mengatakan, pengembangan wisata *in city* dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kecenderungan wisatawan domestik melakukan perjalanan dalam satu wilayah yang muncul akibat pandemi. Tak hanya terjadi di Indonesia, fenomena wisata *in city* juga terjadi di mancanegara seperti China dan Inggris.

Gambaran luas di dunia pada umumnya, di negara seperti Inggris, Perancis, ada tren bahwa sumbangan pariwisata terhadap PDB 70% lebih dari turis domestik. Data lain, jumlah turis domestik di Brazil, Tiongkok jumlahnya mencapai 90%.

"Artinya turis domestik memberikan topangan dan dorongan bagi sektor pariwisata. Sementara negara seperti Thailand, Singapura ketergantungan terhadap turis internasional mencapai lebih dari 70%. Indonesia posisinya ada di tengah, 56% tergantung dari turis domestik dan sisanya 44% dari mancanegara," kata Deputi Odo.

Melihat tren yang tengah terjadi, Deputi Odo mengatakan pemerintah tengah berupaya meningkatkan kontribusi wisatawan domestik dari sekitar 50% menjadi 70% dengan cara meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air.

"Artinya destinasinya bagus, SDM-nya bagus, atraksinya juga bagus. Dilihat dari tourism indeks, salah satu kekurangan pariwisata Indonesia adalah dari aspek kebersihan dan atraksinya. Perbaikan ini tentu membutuhkan kerja sama dari *multistakeholder*," ucap Deputi Odo.

Terapkan Protokol Kesehatan

Untuk memulihkan kembali sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi covid-19, pemerintah juga akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk sektor pariwisata.

"Pembahasan tengah dilakukan dan draftnya sudah ada di Kementerian Kesehatan untuk nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Deputi Odo.

Deputi Odo mengatakan, draft protokol kesehatan untuk sektor pariwisata bukan hanya digagas oleh Kementerian Pariwisata dan pihak terkait. Di dalamnya juga terdapat berbagai usulan dari asosiasi pengusaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan adanya protokol kesehatan sektor pariwisata, diharapkan akan membawa dampak positif, salah satunya bisa menimbulkan kepercayaan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Tanah Air. Karenanya, semua pihak terutama pelaku usaha di sektor pariwisata harus menerapkannya.

"Kalau ini dijalankan, bisa menimbulkan kepercayaan dan ini akan meningkatkan kedatangan turis," kata Deputi Odo.



Sumber Foto: Maritim.go.id

KENYAMANAN WISTAWAN UNTUK BERWISATA KEMBALI

SUMBER : TRAVELOKA, MEI 2020

1 BULAN KEDEPAN



1 - 3 BULAN KEDEPAN



3 - 6 BULAN KEDEPAN



6 - 12 BULAN KEDEPAN



Sangat Tidak Setuju **Tidak Setuju** **Ragu-Ragu** **Setuju** **Sangat Setuju**



- 1st Qtr
- 2nd Qtr
- 3rd Qtr
- 4th Qtr

Category 4

Category 2

Category 3

Category 4

Chart Title

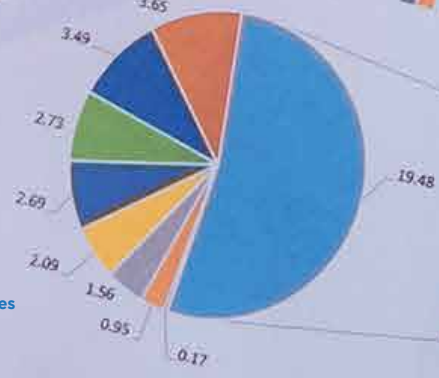


Category 2

Category 3

Series 1 ■ Series 2 ■ Series 3

	Series 1	Series 2
1/1/2016		5.60
2/1/2016	0.17	
3/1/2016	0.95	8.52
4/1/2016	1.56	8.74
5/1/2016	2.09	1.08
6/1/2016	2.69	5.54
7/1/2016	2.73	3.03
8/1/2016	3.49	6.00
9/1/2016	3.65	5.78
10/1/2016	4.01	4.32
11/1/2016	4.57	7.56
12/1/2016	5.45	5.90
1/1/2016	5.45	2.43
2/1/2016	0.17	5.60
3/1/2016	0.95	8.52
4/1/2016	1.56	8.74
5/1/2016	2.09	1.08
6/1/2016	2.69	5.54
7/1/2016	2.73	3.03
8/1/2016	3.49	6.00
9/1/2016	3.65	5.78
10/1/2016	4.01	4.32
11/1/2016	4.57	7.56
12/1/2016	5.45	5.90
1/1/2016	5.45	2.43



Series 2
5.60
8.52
8.74
1.08
5.54
3.03
6.00
5.78
4.32

Optimisme Sektor Investasi Masa Pandemi

Majalah Marves-Jakarta, Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus ini bahkan turut memengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, Ekonomi global dipastikan melambat.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto, mengatakan dampak wabah covid-19 ini sangat dirasakan sektor ekonomi baik dari sisi suplai dan permintaan. "Karena pabrik tutup, ada *lock down*, sehingga suplai ke pasar terganggu. Sementara dari sisi permintaan juga terganggu karena konsumen tidak bisa belanja dan juga kehilangan pendapatan akibat adanya pembatasan aktivitas," kata Deputi Seto di Jakarta, Selasa 9 Juni 2020.

"Para ahli ekonomi mengatakan krisis ekonomi yang disebabkan Covid-19 ini dampaknya akan sama dengan *great depression* di tahun 1930an, tak bisa disamakan dengan krisis tahun 97/98 atau 2008/2009. Yang membedakan itu tadi, dua hal yang langsung kena yaitu sisi suplai dan permintaan, dan ini kena hampir ke seluruh dunia sehingga dampak ekonominya cukup signifikan," imbuhnya.

Meski terjadi di seluruh dunia, Deputi Seto mengatakan pemerintah tetap optimis, meskipun harus hati-hati, menghadapi pelambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi. "Dalam kasus Indonesia kita cukup beruntung karena pasar domestiknya sangat besar. Sehingga kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal I 2020 memang turun, tetapi masih positif. Di sejumlah negara lain bahkan ada yang negatif," katanya.

Dari sisi investasi, Deputi Seto mengatakan pemerintah masih optimis dan akan fokus pada investasi yang bersifat strategis. Artinya investasi yang bisa memberi nilai tambah atas

kekayaan alam Indonesia, menciptakan pemerataan pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja. Masih menurutnya, sejauh ini belum ada pembatalan komitmen investasi. Dia menyebutkan investasi Hyundai untuk pembangunan pabrik mobil dan mobil listrik sebagai contoh. Sedianya pihak Hyundai melakukan *ground breaking* pabrik mobil mereka pada April tahun ini, namun ditunda hingga November nanti. "Satu lagi investasi pabrik susu senilai 4 triliun. Seharusnya semester I tahun ini tapi juga terpaksa harus ditunda karena banyak tenaga ahli mereka yang belum bisa datang. Dua contoh itu menjadi indikator Indonesia masih menarik untuk investor. Saya menyebutkan kita optimis tapi juga harus tetap hati-hati," terangnya.

Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Konstruksi Adalah Sektor Tersiap Masa Transisi

Sebelumnya, Deputi Seto menyatakan, sektor pertambangan, perkebunan dan sektor konstruksi dinilai sebagai sektor ekonomi yang paling siap dibuka kembali di masa transisi menuju kenormalan baru atau *new normal*.

Ia juga mengatakan pembukaan sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor konstruksi akan mempercepat realisasi komitmen investasi di Indonesia.

"Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang dibuka terlebih dahulu oleh pemerintah. Kita juga siapkan sektor konstruksi, sebab sektor ini mendatangkan investasi cukup besar. Ada LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau proses konstruksinya tidak jalan maka ini bisa menghambat," kata Deputi Seto, Senin 8 Juni 2020.

Terkait pembukaan kembali sektor pertambangan dan sektor konstruksi, Deputi Seto mengatakan kementerian terkait telah menyiapkan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh

para pekerja di kedua sektor tersebut.

Lebih lanjut, Deputi Seto mengatakan pembukaan kembali sektor pertambangan dan sektor konstruksi akan dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi perkembangan kasus covid-19 di suatu daerah. "Kita akan lihat daerah per daerah. Daerah mana yang kasus covid-nya sudah terkendali. Kita akan mengikuti acuan tersebut," katanya.

Ia pun berpesan agar setiap pemangku kepentingan di tiap sektor ekonomi secara ketat mengawasi penerapan protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar gelombang kedua penyebaran covid-19 tidak terjadi di Indonesia. "Soal pengawasan protokol kesehatan, saya menilai tingkat kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker sudah tinggi. Mungkin tinggal physical distancing dan cuci tangan. Nanti tinggal tingkat kedisiplinan sektor usahanya mengingatkan karyawan atau customer yang datang agar mematuhi protokol mereka," ucapnya.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mempersilakan sembilan sektor ekonomi untuk dibuka kembali di masa transisi menuju kenormalan baru atau *new normal*.

9 SEKTOR EKONOMI YANG DIBUKA KEMBALI

PERTAMBANGAN
PERMINYAKAN
INDUSTRI
KONSTRUKSI
PERKEBUNAN
PERTANIAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
LOGISTIK
TRANSPORTASI BARANG



Sumber Foto: Media Indonesia



Memasuki Era *New Normal*, Kemenko Marves Adakan *Rapid Test Covid-19*

Majalah Marves-Jakarta, Dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta upaya menghadapi era *New Normal*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan *Rapid Test Covid-19* yang berlangsung selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 8 hingga 10 Juni 2020.

Melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Agung Kuswandono menegaskan bahwa Kemenko Marves selalu mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Untuk menindaklanjuti itu, kita selalu membuat surat edaran, juga melakukan persiapan-persiapan untuk pencegahan virus Covid-19. Kita lakukan rapid test untuk seluruh pegawai Kemenko Marves, jika hasilnya ada yang reaktif, kita akan langsung tangani secepatnya. Kita minta untuk karantina mandiri, melakukan swab test dan kita isolasi dari teman-teman yang ada di sini dan dari keluarganya,” tambah Sesmenko Agung saat melakukan *Rapid Test Covid-19* Gelombang II yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Marves Jakarta, pada Selasa (09-06-2020).

Lebih lanjut, Sesmenko Agung juga menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Kemenko Marves dalam menghadapi era *New Normal* ini.

“Saat ini kita juga membuat backpack yang isinya adalah alat-alat pencegahan

seperti *hand sanitizer*, masker, alat pembuka pintu, dan macam-macam. Kita buat itu, supaya nanti teman-teman tetap aman baik dari berangkat hingga pulang kantor,” jelas Sesmenko Agung.

Penyediaan transportasi atau kendaraan di empat titik atau lokasi bagi seluruh pegawai di lingkup Kemenko Marves serta pemberlakuan sistem kerja secara bergantian yaitu sebagian bekerja di kantor atau *Work From Office* serta sisanya bekerja di rumah atau *Work From Home* merupakan upaya lainnya yang diterapkan Kemenko Marves.

Begitu pegawai sudah mulai masuk kantor, kita lakukan pencegahan dengan rapid test terlebih dahulu. Dasarnya, harus aman dan sehat dulu. Semua perintah dari Pemerintah sudah kita jalankan, kuncinya disiplin untuk menjaga diri, menjaga teman-teman kita dan menjaga keluarga kita. Kita harap, dalam waktu dekat wabah ini akan selesai dan lekas pulih

Agung Kuswandono
Sekretaris Kemenko Marves



Kemenko Marves Gandeng Kemenparekraf Kembangkan **Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Majalah Marves - Jakarta, Dalam rangka pembangunan ekonomi dan keuangan syariah nasional khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaksanakan berbagai koordinasi sinergisitas.

Rapat koordinasi sebagai ajang diskusi terkait rencana pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun digelar pada 5 Mei 2020. Koordinasi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Dalam rapat tersebut, SAM Sugeng mengungkapkan, Kemenko Marves bersama Kemenparekraf membahas berbagai hal terkait penguatan rantai nilai industri halal yang dapat dikembangkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf dalam berbagai klaster, seperti klaster makanan dan minuman (kuliner) halal, klaster pariwisata halal, klaster fesyen muslim, klaster media & rekreasi halal.

“Sebagai salah satu komoditas unggulan dalam industri halal, klaster makanan dan minuman (kuliner) halal akan dilakukan upaya penguatan dengan bersinergi pihak terkait industri halal. Industri ini memainkan peran penting dalam rantai makanan global yang memenuhi beragam kebutuhan konsumen,” kata SAM Sugeng.

Untuk pengembangan klaster pariwisata halal, SAM Sugeng mendorong penyusunan paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan, melakukan *branding* pariwisata halal melalui media sosial dan eksibisi,

serta merumuskan kebijakan pariwisata halal yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Kami yakin kekuatan pariwisata halal Indonesia terletak pada kesiapan destinasi untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan global. Destinasi pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan muslim pada saat melakukan perjalanan wisata melalui pemenuhan layanan tambahan amenities, daya tarik wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim,” tambahnya.

Sementara itu, untuk penguatan klaster fashion muslim, SAM Sugeng mengatakan perlunya dukungan *business matching forum*, kampanye cinta produk fashion muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas, melaksanakan kegiatan promosi bertaraf internasional dan partisipasi pada *event fashion muslim internasional*.

“Performa ekspor Indonesia untuk industri fashion muslim sejalan dengan performa ekspor komoditas dan produk tekstil, sebagai salah satu industri hulu fashion muslim, yang nilainya terus meningkat,” ungkapnya.

Sementara penguatan klaster media dan rekreasi halal dapat dilakukan dengan pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung branding industri halal, pembentukan sektor unggulan, dan prioritas media dan rekreasi.

“Selain industri halal, diperlukan pula penguatan keuangan syariah yang terdiri dari klaster perbankan syariah, klaster pasar modal syariah, klaster jaminan sosial syariah, dan klaster zakat & wakaf, dengan menyesuaikan kebutuhan



industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucap SAM Sugeng.

SAM Sugeng berharap, ekosistem ekonomi syariah dengan elemen rantai nilai industri halal dalam berbagai sektor ini dapat menopang lini perekonomian nasional baik selama masa pandemi atau di masa era kenormalan baru.

SAM Sugeng pun menekankan pentingnya literasi masyarakat agar memiliki kesadaran akan manfaat ekonomi dan keuangan berbasis syariah yang meliputi pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Syariah atau halal tidak sebatas pada pengertian dan kebutuhan muslim semata namun dapat menjadi landasan pelayanan berstandar mutu tinggi dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan pada umumnya,” kata SAM Sugeng.

Sementara itu Plt. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/ Baparekraf mengatakan, pemberian fasilitas pembiayaan mikro syariah dan pendampingan sesuai dengan skala usaha tetap dibutuhkan dalam rangka penguatan UMKM. Sementara penguatan ekonomi digital bisa dilakukan dengan mengembangkan *online marketplace* dan sistem pembayaran halal, menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang dapat diakses

oleh publik, meningkatkan literasi digital dan halal *value chain* bagi pelaku ekonomi Islam melalui pameran, kompetisi, maupun forum di daerah-daerah potensial.

“Ke depannya diperlukan rencana program kegiatan untuk meningkatkan rantai nilai, salah satunya dengan pengumpulan database pelaku usaha dengan sertifikat halal menuju destinasi pariwisata halal,” kata Plt. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf.

Sebagai bentuk koordinasi awal dalam upaya menjalin sinergisitas, sesuai dengan Perpres KNEKS, Kemenkomarves dan Kemenparekraf/Baparekraf mengadakan rapat daring sebagai ajang diskusi terkait rencana pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sugeng Santoso
Staf Ahli Menteri (SAM)
Bidang Ekonomi Maritim





Kelola Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Kearifan Lokal

Majalah Marves-Jakarta, Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan bermata pencaharian di sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menyusun strategi mendongkrak perekonomian wilayah pesisir di era kenormalan baru (*new normal*).

Staf Ahli Menko (SAM) Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves, Tukul Rameyo Adi mengatakan, pemberdayaan pengetahuan dan kearifan lokal untuk pengelolaan pesisir berkelanjutan memiliki nilai strategis dalam mendukung prioritas nasional pengembangan wilayah. Terutama untuk mengurangi kesenjangan dan pembangunan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ketahanan bencana, termasuk pemulihan paska pandemi Covid-19.

“Menyikapi situasi global dan nasional terkait pandemi virus Corona, pemberdayaan pengetahuan dan kearifan lokal untuk pengelolaan pesisir memiliki peran strategis,” kata SAM Rameyo di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2020.

SAM Rameyo memberi contoh *Ecosystem Approach for Fisheries Management* (EAFM) sebagai model pendekatan pengelolaan perikanan, khususnya perikanan skala kecil yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Pendekatan ini sejatinya sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat nelayan lokal sebagai bagian dari pengetahuan dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir.

“Model pendekatan ini dapat dijumpai pada pola kearifan lokal Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku dan Awig-Awig di Bali dan Lombok,” kata SAM Rameyo.

SAM Rameyo menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pengetahuan/kearifan lokal tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sebagai kelanjutan dari kebijakan *look east policy* yang telah dimulai dalam periode sebelumnya.

Dimana, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui adaptasi masyarakat berbasis kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu strategi agenda pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, khususnya pada program pembangunan wilayah perpulau.

Hasil beberapa studi menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal harus menjadi titik awal pembangunan berkelanjutan. Tanpa memahami nilai-nilai pengetahuan/kearifan lokal serta persepsi dan perspektif yang dimiliki masyarakat, maka akan sulit mengharapkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan konsep *development for people*.

SAM Rameyo menambahkan, Indonesia telah merilis Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Di dalamnya mencakup 60 indikator terpilih dan target-target pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan kekayaan 1.340 suku yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan agama, maka bagi Indonesia hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan dukungan kemitraan multipihak.

“Sebagai aksi jangka pendek (Tahun 2020), perlu adanya inisiatif kolaborasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk pengembangan lokasi percontohan sebagai *showcase* model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Pengembangan *showcase* diutamakan di wilayah Indonesia Timur sebagai implementasi dari kebijakan *look east policy* dan sejalan dengan agenda nasional pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,” kata SAM Rameyo.

“Dalam menyusun aksi strategis jangka menengah (Tahun 2021-2024) perlu ditentukan target dan indikator yang merupakan penjabaran dari target-target outcome yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai basis sasaran program/kegiatan pengembangan model kolaborasi,” tutupnya.

Kemenko Marves Terus Mempercepat Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)



Majalah Marves -Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kembali mengadakan Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi (RB), di Juni 2020, dilihat secara virtual, Jumat 3 April 2020.

Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Budi Purwanto menjelaskan, melalui forum ini, agar target penyelesaian yang sudah diperjanjikan melalui rencana aksi, supaya di masing-masing penanggung jawab RB di unit kerja Eselon I, dapat bertanggung jawab untuk melaporkan progresnya kepada Biro Hukum setiap bulannya. "Sekecil apapun perkembangan tersebut disertai bukti dukung, unit kerja kami pun bekerjasama dengan Inspektorat, serta terbuka bagi para penanggung jawab RB di masing-masing Deputy, apabila butuh pendampingan dalam mendukung peningkatan RB," ujar Karo Budi.

Senada, Inspektorat Kemenko Marves, Ajum Muchtar mengatakan, bahwa unit kerjanya dan Biro Hukum, akan bekerjasama memeriksa bukti dukung yang telah diinput oleh masing-masing unit kerja Eselon I ke dalam aplikasi e-RB. "Ini untuk diyakini sebelum dimasukkan ke dalam PMPRB online, inovasi dari masing-masing pokja harap diupload karena akan memberikan penilaian lebih," jelas Inspektur Ajum.

Sebagai informasi, Kementerian PAN-RB telah menginformasikan, bahwa batas waktu PMPRB online semula 31 April, menjadi 31 Mei 2020. Dan Inspektorat Kemenko Marves pun sudah menyusun kebijakan untuk mendukung RB pada area pengawasan. "Dan ini harus dapat diimplementasi oleh seluruh unit eselon I Kemenko Marves. Kemudian, Pengisian untuk SPIP unit eselon I SOTK baru untuk

dilanjutkan dan pengisian LHKASN yang sudah dilakukan, akan dilakukan verifikasi oleh tim Inspektorat sebelum penilaian PMPRB dilakukan," tambahnya.

Plt Karo Komunikasi Kemenko Marves, Andreas D Patria, juga menginformasikan, bahwa integrasi sistem di lingkungan Kemenko Marves sudah mulai dilakukan. "Dimulai dari penataan sistem kepegawaian, dan selanjutnya adalah sistem persuratan, pun sedang dilakukan juga pengembangan sistem pemantauan kinerja oleh Menko Marves kepada para Deputy melalui sarana teknologi," jelas Plt Karo Andreas.

Nantinya, hal tersebut dapat menjadi bukti dukung inovasi RB. Selain itu, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) harus segera diselesaikan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map RB Kemenko Marves.

Kemudian, Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves, Arif Rahman memaparkan, perihal target penyerapan anggaran Kemenko Marves terpenuhi. "Untuk revisi Perjanjian Kinerja yang berorientasi pada output, sepanjang kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi, masih diperbolehkan," jelasnya.

Karo Arif juga mengusulkan, terkait dengan RB untuk area perubahan akuntabilitas kinerja, pohon kinerja, dan *quick wins* untuk bukti dukung yang akan diserahkan, sebaiknya menggunakan SOTK lama.

Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Umum Tito Setiawan juga menyampaikan, bahwa di area penataan SDM langkah awal yang segera ditindaklanjuti dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kemenko Marves adalah dengan

segera melakukan penataan staf dan pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Lebih lanjut, para Sekretaris Deputy di masing-masing Deputy lingkup Kemenko Marves bersepakat, bahwa bukti dukung dari rencana aksi yang dibuat, akan dilakukan koordinasi dengan tim RB internal Deputy terutama untuk target penyerahan di bulan April mendatang.

Para Sesdep juga menyatakan, bahwa Renaksi pun sudah disampaikan, dan kelengkapan bukti dukung akan disampaikan sesuai *timeline* waktu yang telah disepakati, namun untuk bukti dukung RB pada area perubahan tata laksana belum signifikan, maka diharapkan dengan adanya Biro Komunikasi, integrasi sistem dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan para Sesdep satu suara dan menyatakan, integrasi sistem merupakan salah satu penilaian yang signifikan untuk meningkatkan nilai RB Kemenko Marves.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Biro Hukum dan Inspektorat Kemenko Marves, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB untuk mekanisme pemantauan Renaksi, PMPRB dan PMPZI.



#MarvesTV #Kemenkomarves

Maritim dan Investasi Televisi

300 views



Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
3.21 K

SUBSCRIBE

**Temukan berbagai informasi mengenai
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
melalui Marves TV**



Resensi Film: *Extraction*

Antara Tentara Bayaran dan Anak Bandar Narkoba

Chris Hemsworth kembali menunjukkan aksi memukanya dalam bertarung, namun kali ini bukan sebuah palu sakti, melainkan senjata tajam yang menjadi andalannya. Bermain sebagai tentara bayaran dalam film thriller bertajuk *Extraction*, Chris Hemsworth (yang selanjutnya berperan sebagai Tyler Rake) mendapatkan misi berbahaya yaitu menyelamatkan seorang anak bernama Ovi Mahajan Junior (yang diperankan oleh Rudhraksh), yang merupakan anak dari Bandar Narkoba terbesar di India Ovi (yang diperankan oleh Rudraksh Jaiswal). Ovi Junior diculik oleh Bandar Narkoba Terbesar Bangladesh Amir Asif (yang diperankan oleh Priyanshu Painyuli).

Dalam aksinya, Tyler yang juga merupakan mantan tentara Australian *Special Air Service Regiment* ini mendapatkan banyak hambatan, mulai dari pengkhianatan oleh Saju Rav (yang diperankan oleh Randeep Hooda), yang bukan lain adalah orang kepercayaan ayah Ovi Junior, kemudian pengepungan dirinya di seluruh kota Bangladesh, hingga satu-persatu temannya dibunuh.

Namun permasalahan tersebut ternyata justru membuat Tyler semakin ingin menyelamatkan Ovi Junior. Sebab, keadaan membuatnya kembali teringat ketika ia memiliki sesuatu yang bisa dilindungi, yaitu keluarga dan anak. Sehingga Tyler pun siap menghadapi resiko terberat dalam menyelamatkan Ovi Junior, meski harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun.

Secara umum, film produksi Russo bersaudara ini mampu mengaduk emosi saat menontonnya. Terkenal sadis dengan gelar tentara bayaran, ternyata tak lantas menghilangkan sisi baik dari seorang Tyler. Tak heran jika durasi 1 jam 56 menit terkesan sangat cepat berlalu.

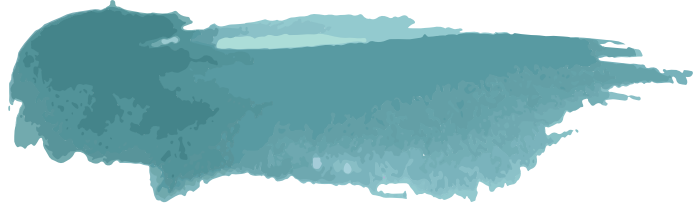
Extraction sendiri merupakan film yang diadaptasi dari komik *Ciudad* karya Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando Leon Gonzalez, dan Eric Skillman. Film yang tayang pada 24 April 2020 ini disutradarai oleh Sam Hargrave yang juga merupakan koordinator stunt *Captain America: Civil War* (2016) dan *Avengers: Endgame* (2019).



Sumber Foto: Google.com

Kamar Pesakitan

Karya Joko Rehutomo



Ketika sepasang kelopak mataku terbuka, bayangan yang pertama kali tertangkap lensa adalah wajah sembab Mas Lembah. Seperti biasa, senyum teduhnya menyembul, namun kali ini terasa janggal. Kesadaran yang belum sempurna karena pengaruh obat bius, membuatku linglung.

Pandanganku berlari ke arah tembok. Serba putih, warna khas rumah sakit. Nyaris tak ada hiasan, hanya lukisan ukuran sedang. Goresan abstrak sekerumunan kupu-kupu bersayap cerah tengah beterbangan. Menempel anggun, simetris di tengah. Di sampingnya, agak ke atas, TV ukuran 14 inch bertengger dalam keadaan membisu. Ekor mata melirik ke kanan, ranjang sebelah kosong. Berarti akulah satu-satunya penghuni kamar ini untuk sementara waktu.

Reflek tangan kugerakkan, ngilu terasa. Selang infus menempel di sana. Di tambah selang satu lagi yang menjulur dari balik ketiak kanan. Tetesan darah terlihat berjalan pelan, memenuhi kantong plastik yang terletak di bawah tempat tidur. Hidungku menangkap bau obat menguar tajam. Oh, kini aku ingat! Tak terasa buliran bening menderas di pipi.

"Sabar, ya, Dik," Mas Lembah mencium kening. Dibelainya anak rambutku yang ikal.

"Mereka telah mengambilnya, Mas..." tak kuasa kuteruskan kata, lidah terjulai kelu. Bagian tubuh yang menjadi kebanggaan setiap perempuan itu telah kehilangan pasangannya. Ya, payudaraku sebelah kanan beberapa jam lampau telah terpisah dari tubuh. Kanker terkutuk itu telah merenggutnya!

"Sudah, ya, Dik. Iklaskan, ini adalah jalan yang terbaik," lirih suara Mas Lembah, matanya berkaca.

"Tapi, Mas. Saras kini adalah perempuan cacat! Harusnya, Mas tidak menandatangani surat persetujuan operasi itu!" lengkingku parau, kuguncang tangan Mas Lembah.

Sejenak pintu terbuka, wajah Bapak dan Ibu menyembul. Mungkin mereka mendengar aku berteriak histeris dan buru-buru masuk. Ibu mendekat dan memelukku, kami berdua bertangisan. Bapak hanya mematung.

"Sabar, ya, Nduk. Tawakal dan legowo.

Gusti Allah tengah mengujimu,"

"Saras, sekarang cacat, Bu. Lalu untuk apa hidup?" Ibu melepaskan pelukan, mukanya memerah.

"Hus, kamu itu ngomong apa, to? Ingat kamu adalah seorang ibu. Nugraha dan Aulia butuh kasih sayang dan bimbinganmu. Mereka titipan Gusti Allah, Nduk!"

Entah mengapa ucapan Ibu yang biasanya selalu membuat hatiku tergerak, terasa tawar. Bagiku dunia kini serasa kiamat. Berkeping semuanya, dan beberapa pasang mata yang hadir seolah memandanku dengan penuh iba. Sejak kecil aku selalu mengejar apa yang kuimpikan dengan gigih, tapi kini aku serasa bagai pecundang. Seorang pesakitan yang menunggu vonis kematian.

Rasa sesal perlahan mengepung. Ah, seandainya dokter itu tak salah diagnosa, pasti aku tak akan kehilangan payudara. Masih utuh, dan pasti aku masih bisa beraktifitas secara normal. Menjalani fungsi sebagai wanita karier sekaligus ibu rumah tangga yang sukses. Apalagi saat ini aku sedang melanjutkan program magister atas beasiswa dari pemerintah. Lalu bagaimana kalau lulus tidak tepat waktu? Apakah program beasiswa masih bisa berlanjut atau akan dicabut? Awas saja, aku pasti akan menuntunnya atas malapraktik yang dilakukan ini!

Keringat bercucuran, dinginnya AC malah membuatku semakin gemetar! Pikiran berputar-putar penuh kesumat, hingga kepala pening. Pandangan tiba-tiba mengabur, dan....gelap!

"Ibu belum bangun, Pak?" lambat-lambat terdengar suara perempuan.

"Belum, Dok. Kemarin pasca operasi, ia begitu terguncang," jawab Mas Lembah pelan, seolah khawatir mengusik tidurku. Diam-diam aku ingin menguping pembicaraan mereka, sehingga kelopak mataku pura-pura mengatup.

"Itu wajar, Pak. Hampir semua pasien mengalaminya. Dukungan keluarga, terutama suami sangatlah diperlukan. Emosi mereka sangat labil."

"Pasti, Dok. Sebagai suami, aku akan selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi!" tukas Mas Lembah mantap. Oh,

apa benar yang kudengar barusan? Apakah kasih suamiku masih seperti dahulu, sebelum diriku menjadi istri yang cacat? Lalu sampai kapan? Sontak sejumlah pertanyaan cemas berloncatan dalam benak!

"Mas..." akhirnya kubuka mata, Mas Lembah dan dokter perempuan itu menoleh. Ternyata mereka bertiga, ada seorang suster di sampingnya.

"Sudah, bangun, Dik. Ini ada Dokter Ayu..." Seorang perempuan muda berjas putih mengangguk, senyumnya merekah. Aku taksir usianya baru pertengahan tiga puluh tahun.

"Selamat pagi. Dokter Ayu..." Ia menjabat tanganku yang lemah. "Mulai hari ini akan mendampingi Ibu Saras selama masa pemulihan,"

"Lalu ke mana Dokter Paulus? Apakah sudah tidak menangani lagi?" bertubi tanyaku.

Dokter Ayu tersenyum, sembari matanya jeli memeriksa cairan infus yang tergantung. "Tenang, Bu. Dokter Paulus masih menangani, kok. Saya hanya membantu tugas beliau. Bukankah pasien lebih nyaman bila yang mengontrol sama-sama perempuan?"

"Benar juga, ya," tanpa sadar aku membenarkan ucapannya. "Aku memang risih bila yang memeriksa dokter lelaki. Kurang sreg dan sama sekali nggak nyaman!"

"Ok, sekarang Dokter periksa, ya? Suster tolong bantu!" Aku mengangguk, dan tanpa disuruh, Mas Lembah segera keluar kamar.

"Maaf, Ibu Saras sudah berputra berapa?"

"Sepasang, Dok. Lelaki dan perempuan," jawabku bangga. Ah, tiba-tiba kerinduanku pada anak-anak seketika membunyah. Kapan ya, mereka menjenguk kemari?

"Syukurlah sudah lengkap. Tak punya rencana nambah kan? Maksudnya dalam waktu dekat?"

"Memang kenapa, Dok?" tanyaku balik, diliputi penasaran.

"Setelah luka operasi kering dan pulih seperti sediakala, Ibu Saras diwajibkan menjalani kemoterapi. Jadi kalau kepengen nambah momongan tunda dulu, ya..."

"Oh, enggak, Dok. Kami kira dua anak sudah cukup. Tapi, Dok..."

"Iya, Bu..."

"So...soal kemoterapi, apakah itu harus?"

"Kenapa? Ibu Saras takut efeknya?"

Wah, Dokter Ayu seperti cenayang, ia tepat membaca pikiranku. Sekilas aku pernah mendengar bahwa dampak kemoterapi antara lain rambut menjadi rontok. Bukan hanya rambut di kepala, tapi semua rambut yang tumbuh di badan, termasuk alis. Tidak terbayangkan, bagaimana penampilanku nanti. Ih, ngeri! Tak sehelai rambut pun menghiasi kepala, seperti tuyul!

"Ibu tenang saja, ya. Sekarang konsentrasi penyembuhan lukanya dulu," Dokter Ayu memeriksa dadaku sebelah kanan. Sedikit bercak darah kering menempel di perban. Aku memalingkan wajah, tak sanggup melihatnya. Bergulung asap seolah memenuhi paru-paru, sesak! Oh, payudaraku!

"Tegar, ya, Bu. Pejamkan mata, jangan dilihat kalau tidak tahan!" Ah, dokter satu ini memang sok tahu. Coba kalau ia bernasib sial seperti yang kualami, apakah sanggup? Menasehati memang lebih mudah daripada yang mengalami. Tinggal ngomong, mengutip kata-kata manis dan bijak. Beres!

"Sebentar lagi, ya, tahan! Maaf, lengannya diangkat sedikit..."

Benar kan? Ia terus memerintah, ini dan itu. Aku meringis menahan nyeri yang tiba-tiba menjalar. Ya, Allah, kenapa kemalangan ini mesti menimpaku?

"Nah, sekarang sudah selesai. Suster, tolong bereskan, ya..." Dengan sigap Suster Dian, nama yang tertera di seragamnya, membereskan gunting, sisa perban dan peralatan lainnya. "Oh ya, tolong periksa kantong infusnya. Sudah mau habis, tuh! Setengah jam lagi ganti dengan yang baru!"

"Siap, Dok..." tukasnya patuh. Jawaban formal yang selalu diucapkan seorang bawahahan. Ah, kenapa mendadak aku menjadi sinis begini, ya?

"Ibu Saras sekarang boleh istirahat. Jangan banyak bergerak, dan minum obat dengan teratur. Ada yang mau Ibu sampaikan?"

Aku hanya menggeleng, enggan membuka mulut.

"Oke, kalau tidak ada, Dokter pamit dulu, ya. Sampai jumpa nanti siang.

Kalau ada keluhan, jangan segan-segan ngomong," pesannya, sebelum sosok langsing itu menghilang di balik pintu.

Lima hari berselang...

Mas Lembah muncul dengan membawa tas kresek kecil. Samar, aku tak begitu jelas isinya, karena aku tidak sedang memakai kacamata.

"Dari apotek, Dik. Nebus obat," jelasnya tanpa kuminta. Kelelahan terpancar dari wajahnya yang tirus. Kuyu, bulu-bulu halus tak beraturan menghiasi pipi. Kasihan, pasti semalam ia tak sempat tidur, apalagi untuk mengurus cambangnya. Pikirannya pasti bercabang, berbagi antara menjagaku, urusan pekerjaan dan rumah. Dan tentunya juga biaya perawatan selama di rumah sakit.

"Mas..."

'Ya, Dik, mau apa?' Mas Lembah yang sedang merapikan obat di laci meja menoleh.

"Eng...obatnya mahal, ya?" tanyaku gusar.

"Nggak, kok, normal," jawab Mas Lembah pendek. "Eh, Bapak-ibu kemarin malam aku suruh istirahat di rumah saja. Kasihan kalau mereka tidur di sini. Sekalian nemenin anak-anak."

Kalimat Mas Lembah berikutnya, jelas ia mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Walaupun berperawakan tinggi besar, namun perasaan suamiku itu halus, suka memendam rasa. Kebalikan denganku yang suka berterus terang dan ceplis- ceplos.

"Mas, terus terang sajalah. Aku tahu, obat itu mahal kan?" kejarku memburu. Gemas!

"Kenapa mesti kamu tanyakan itu, Dik?"

"Wajar dong, aku nanya gitu, Mas. Rumah sakit ini rumah sakit swasta, pasti tidak dicover asuransi kesehatan kita," tukasku ngeyel.

Mas Lembah mendekat, duduk di tepi ranjang dan meraih telapak tanganku yang kurus. Walaupun belum pernah ditimbang, aku merasa berat tubuh mungilkku turun drastis. Emosi yang semula tidak stabil, perlahan luruh. "Aku tak ingin uang tabungan Mas, terkuras untuk biaya rumah sakit,"

"Kamu itu ngomong apa, sih..." kalimatnya tersendat, terlihat ia menata emosi. "Sudahlah, jangan kamu

pusingkan masalah itu. Aku jamin uang kita cukup!" kata Mas Lembah tegas. Aku paham, bila berkata seperti itu, artinya ia tidak mau dibantah lagi.

"Yang penting Dik Saras cepat sembuh, dan cepat pulang ke rumah. Apa kamu tak pengen secepatnya bermain dengan anak-anak lagi?"

"Sekarang Mas yang mulai ngawur. Siapa sih yang tak ingin sembuh dari penyakit terkutuk ini?"

"Nah, gitu dong. Optimis! Jangan berpikiran yang macam-macam!" Aku menjadi tersindir dengan sikapku pasca operasi beberapa hari lalu. Kekalutan dan rasa kehilangan membuatku berpikir tidak rasional. Menyalahkan takdir dan melampiaskan kesal pada orang-orang terdekat dan sekitar. Sungguh konyol dan kekanak-kanakan!

"Mas, maafkan atas sikapku kemarin, ya. Uring-uringan dan menyalahkan Mas Lembah,"

"Jujur aku juga kaget, Dik. Bukankah sebelum Mas membubuhkan tandatangan dan menyetujui operasi, sudah atas kesepakatan kita berdua?" "Iya, sih, Mas. Tapi waktu itu tidak ada pilihan. Yang ada di benakku hanya kematian,"

"Ya, sudahlah, semua sudah berlalu. Sebenarnya aku sudah berkonsultasi dengan Dokter Ayu, langkah apa yang mesti diambil bila kondisi kejiwaan Dik Saras tak kunjung membaik..."

"Dokter Ayu menganjurkan apa, Mas?"

"Terapi psikologis. Ya, psikiater akan memantau perkembangan jiwa Dik Saras. Kemoterapi tidak bisa dilakukan bila pasien belum siap secara mental!"

"Berapa lama itu, Mas?"

"Tak ada patokan waktu yang jelas. Bisa sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Masing-masing pasien tidak sama," tandas Mas Lembah. Ia kini seolah menjelma seorang dokter yang memberi penjelasan kepada pasiennya. "Terus..."

"Syukurlah, sekarang Dik Saras sudah lumayan tenang. Bila kondisi fisik Dik Saras juga bagus, bisa langsung dilakukan kemoterapi."

"Kapan itu, Mas?"

"Mungkin sekitar sebulan lagi. Kita harus bersabar, menunggu luka bekas operasi benar-benar pulih." Terang Mas Lembah bersemangat, lagi-lagi berlagak

layaknya ahli kanker. Nada bicaranya begitu optimis, sehingga membuatku terharu. Sebenarnya ada satu pertanyaan pelik yang melindap dan mesti kusampaikan. Tapi kurasa aku belum sanggup menerima, apalagi jawaban yang meluncur dari bibir Mas Lembah nanti tak seperti yang kuharapkan.

"Hei, mengapa terdiam?" sela Mas Lembah membuatku sedikit teragap.

"Eh, anak-anak kapan diajak kemari, Mas?" tanyaku balik, Akhirnya aku tunda pertanyaan yang mengganjal itu. Mungkin menunggu sampai diriku benar-benar siap mental. Tapi sampai kapan? Entahlah...

"Nanti sore sepulang mengajar aku jemput. Sekalian ambil pakaian bersih,"

"Oh ya, Mas. Tolong sampaikan Bapak-ibu, ya. Jangan sampai mereka sakit karena kelelahan ngurus cucunya."

"Pasti, Dik. Tapi bila bermain dengan kedua cucunya seolah tak ada capeknya," Aku tercenung. Terlempar pada masa berpuluh tahun lampau, ketika aku dan adik-adikku masih kecil. Kami dididik secara keras dan disiplin. Sedangkan sikap mereka kepada kedua cucunya begitu lembut, cenderung memanjakannya.

Pernah aku keberatan akan perbedaan cara mendidik ini tapi Bapak malah menjawab dengan ketus, "Kamu kan belum pernah menjadi seorang kakek!" Lalu sambungannya tak kalah pedas, "Malah kamu lebih bandel ketika seumurannya Aulia!"

Bapak-ibu memang tinggal berlainan kota dengan kami. Usai dipinang Mas Lembah, aku diboyong ke Surabaya. Sedangkan Bapak-ibu tinggal di sebuah kota kecamatan, di lereng Gunung Lawu, berjarak beberapa kilometer dari kota kecil Magetan. Bila tidak ada urusan di rumah dan rasa kangen membuncah, mereka akan segera pergi menjenguk cucunya. Apalagi sudah hampir dua tahun Bapak pensiun. Tak peduli tengah malam, mereka akan segera mengontak travel, atau besoknya pagi-pagi buta bergegas menuju terminal, dan berangkat dengan bus yang pertama!

Bila kakek-neneknya berada di rumah, keberadaanku terkadang tidak dianggap. Nugraha dan Aulia selalu membandingkan kami dengan

kakek-neneknya. Mereka selalu merengek minta dibelikan sesuatu dan Bapak atau Ibu pasti menurutinya. Padahal kuterapkan pada mereka untuk menabung terlebih dahulu, bila ingin mendapatkan barang yang diinginkan. Apalagi bila barang itu harganya mahal! "Ah, biarkan saja. Kami kan tidak ketemu setiap hari. Jadi jangan melarang bila Ibu membelikan sesuatu pada cucu-cucuku!"

Aku tidak bisa membantah bila Ibu berkata begitu. Sifat Ibu keras, dan parahnya sifat itu sedikit kuwarisi. Bila salah bicara takut menyakiti perasaannya. Pernah aku mengadu kepada Mas Lembah, tetapi ia malah menertawakan. Aneh, seharusnya ia malah mendukungku, bukan sebaliknya. "Biarlah, Dik. Aku rasa itu masih wajar-wajar saja. Toh, semua kakek dan nenek di dunia juga pasti begitu. Itu sudah hukum alam, kakek dan nenek lebih sayang cucu dibandingkan anaknya!"

Aku sebal mendengarnya, malah ia meledek, "Hehe...kamu iri, ya? Dik Saras pengen mainan juga? Ya udah nanti kubelikan." Cubitanku bakalan mendarat di lengannya, bila ia tidak terburu menghindar dan kabur. Ah, aku jadi kangen dengan kejadian-kejadian konyol seperti itu. Riak-riak kecil yang membuat jalinan rumah tangga semakin kuat.

Akhirnya seiring waktu, aku bisa memahami sikap Mas Lembah. Sejak remaja ia harus nderek, karena Bapaknya meninggal sewaktu ia masih duduk di kelas satu SMP. Sehingga ibunya dengan terpaksa harus menyerahkan pengasuhan dan pendidikan Mas Lembah dan adik perempuannya kepada sang paman. Jadi setelah berumah tangga dan mempunyai anak, semampu mungkin menuruti keinginan Nugraha dan Aulia. Pintu terbuka, Suster Dian masuk dengan mendorong troli berisi ransum makanan.

"Aduh, Bu Saras, makan yang banyak dong, biar tidak lemas!" komentarnya melihat ransum sebelumnya nyaris tidak kusentuh. Memang selama pindah ke kamar perawatan ini asupan masakan yang masuk ke perutku teramat sedikit. Mulut terasa pahit, dan bila dipaksakan akan muntah.

"Maunya makan banyak, Sus, tapi gimana lagi..." tukasku pasrah. Suster Dian menggelengkan kepala, mungkin sedikit kesal. Aku senang ia bersikap begitu, berarti ia peduli dengan keadaan perkembangan pasien. Sudah menjadi rahasia umum, kalau suster atau perawat di sejumlah rumah sakit tidak memberikan pelayanan sesuai standar. Muka mereka judes, membuat pasien tidak betah!

Suster Dian memeriksa persediaan obat yang ada di laci, kemudian mencatatnya. Lalu memeriksa kantung infus. Dijentiknya dengan jari untuk memperlancar aliran.

"Obat anti mualnya diminum teratur, ya. Biar mualnya berkurang. Usahakan jangan dimuntahkan!" Kali ini ia berkata dengan lembut, walaupun senyum belum terbit seperti biasanya.

"Tuh, dengar apa yang dibilang Suster, kadang bandel, sih..." seloroh Mas Lembah. Matak yang besar melotot ke arahnya, ia hanya nyengir. Reflek kugerakkan tangan, ingin meraih tangannya dan kucubit seperti biasa setiap kesal padanya. Oh, aku lupa belum bisa bergerak bebas, nyeri masih terasa di pangkal lengan.

"Nah, sakit kan? Nanti saja kalau Dik Saras sudah kembali ke rumah, silahkan cubit Mas sepuasnya!" Kembali Mas Lembah mengolokku. Suster Dian pun kini tersenyum, aku tersipu, hanya bisa menggerutu dalam hati.

Awas saja, Mas, pasti kucubit kamu bila aku sudah sembuh nanti!

"Wah, Bapak-ibu ini membuat Dian ngiri saja. Oh ya, nanti sore yang mengontrol adalah Dokter Paulus, Dokter Ayu sedang off. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan,"

"Terima kasih, Sus, " hampir bersamaan aku dan Mas Lembah menjawab.

"Nah tuh, kan, ngomong saja kompak..." canda suster ramah itu sembari bersiap mendorong trolinya keluar kamar. Kami pun berpandangan dan tersenyum geli.

Ya, Allah terimakasih, telah Engkau karuniakan orang-orang terbaik di sisiku. Di kala diriku terpukul, dan putus asa. Melela di pelupuk mata, wajah-wajah Bapak-ibu, Nugraha, Aulia secara bergantian. Keceriaan memancar ketika menyambut kepulanganku dari rumah sakit. Ayo, Saras makan yang banyak! Ah, aku ingin secepatnya menjalani kemoterapi dan bebas dari jeratan kanker terkutuk ini. Ayo Saras semangat! Kamu pasti bisa! (***)

Lara Indonesia

Karya Rvans

Awan gelap datang tiba-tiba

Ibu Pertiwi berduka

Nusantara yang biasa ramai

Kini mendadak sepi

Tuhan... kami tahu ini ujian

Kami tahu Engkau pasti akan memberi jalan

Keluar dan bangkit dari ujian

Menapak hari esok dengan kecerahan

Kami hanya manusia ..

Tak berdaya tanpaMu

Engkaulah Mahakuasa

Terhadap semua ciptaanmu

Tuhan beri kami setitik cahayaMu

Untuk menguatkan

Pasrah kepadamu

Demi persatuan dan kesatuan

INDONESIA

Tahukah Kamu?

Lambang Kehormatan RAPATI TNI



Salam #TimMarves,

Apabila kita perhatikan, di ruang kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, ada dua bendera yang berdiri berdampingan, selain Sang Saka Merah Putih, bendera apakah yang berdiri tegak di sebelahnya? Jawabannya adalah ; Panji atau lambang dengan simbol 4 bintang emas tersebut adalah, Bendera Perwira Tinggi (Rapati) Tentara Nasional Indonesia.

Penggunaan atribut kehormatan perwira tinggi TNI tersebut, berhak dimiliki oleh Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan, yang dianugerahi Gelar Jenderal Kehormatan pada era kepemimpinan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid, pada tahun 2000-2001.

Selain Menko Luhut, Gelar Jenderal Kehormatan juga dianugerahkan kepada, mantan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarmanto (di era kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto), mantan Menteri Perhubungan, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri), mantan Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (era Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri), mantan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno (era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri), mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI (Purn) AM. Hendropriyono (era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri), dan Menteri Pertahanan saat ini, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto (oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo).

Nah, berarti kalau nanti ada ada yang bilang itu bendera negara tertentu, kita bisa koreksi yah #TimMarves.

(source : Liputan6.com)

Laut Natuna Utara

Salam #TimMarves

Ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara, dari 18 negara yang berkonflik teritori dengan Tiongkok, yang dengan langkah tegak, maju terlebih dahulu, meninggalkan negara lainnya, dengan mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Adalah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah komando Menko Luhut, pada tahun 2017 yang mengeluarkan Peta Resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah dilaporkan langsung kepada United Nation atau Perserikatan Bangsa Bangsa. Langkah tersebut diambil menurut Menko Luhut, ialah demi mewujudkan kejelasan hukum di laut dan mengamankan teritorial Zona Ekonomi Eksklusif milik Republik Indonesia.

Percaya kan Sahabat Marves? memang sudah karakter bangsa kita sejak dulu, kalau sudah menyangkut tanah air tumpah darah, kita memang pantang berkompromi.

(source : Intisari.grid.id)





PENELANTARAN AWAK KAPAL

Laporan Kasus Penelantaran Awak Kapal Indonesia
Form ini dikelola oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
untuk merespon dan menindaklanjuti kasus-kasus yang dialami oleh awak kapal Indonesia
baik di kapal niaga maupun kapal perikanan.

<https://maritim.go.id/laporan-kasus-penelantaran-awak-kapal-indonesia/>





Selamat Hari Nelayan Indonesia 06 April 2020

